



LAPORAN ATAS PENGELOLAAN  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEJABAT NEGARA

SEMESTER II  
2021

**PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri  
(Persero)**  
**Jl. Letjen Suprpto No. 45 Cempaka Putih**  
**Jakarta Pusat 10520**  
**Telp. (021) 4241808, Faks. (021) 4203809**  
**Website: [www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)**

24 Februari 2022

Nomor : SRT-44/DIR.1/022022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth.  
**Menteri Keuangan RI**  
**C.q. Direktur Jenderal Anggaran**  
Di Jakarta

**Hal : Laporan Manajemen atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun  
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Semester II  
Tahun 2021**

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ;

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/PMK.02/2019 tanggal 20 November 2019 tentang : "Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara", sebagai pengganti atas dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.02/2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero),

bersama ini disampaikan Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 sesuai Sistematika Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Laporan disajikan dengan membandingkan realisasi dan pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran periode Semester II Tahun 2021 dengan periode Semester I Tahun 2021 dalam beberapa aspek yaitu Aspek Operasional, Aspek Keuangan, Aspek Investasi dan Laporan

Administratif Dana Belanja Pensiun APBN serta peningkatan pelayanan dan penghargaan-penghargaan yang diperoleh PT TASPEN (Persero) dalam kurun Semester II Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

PT Taspen (Persero)  
Direksi  
  
A.N.S. Kosasih  
Direktur Utama

Tembusan Yth.  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

OT.02.01

## **KATA PENGANTAR**

Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.02/2021 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberlakukan sejak tanggal 31 Mei 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.02/2017 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Bentuk dan sistematika Laporan Tahunan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 169/PMK.02/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya Nomor : 243/PMK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016, bahwa terhitung sejak Januari 2020 penyampaian laporan dilakukan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja akumulasi iuran pensiun (aplikasi SMART AIP). Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi yang disajikan sekarang-kurangnya mencakup aspek Operasional, aspek Keuangan, dan aspek Investasi.

Sehubungan dengan diterbitkannya PMK Nomor: 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero), dalam Pasal 5 disebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) dihimbau untuk membuka rekening yang digunakan khusus untuk menampung Dana Belanja Pensiun berdasarkan persetujuan dari KPA BUN dan melakukan penyetoran Jasa Giro atas rekening tersebut ke Kas Negara, sebagai turunannya adalah Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015, tentang Tata cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang terakhir diubah pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018. Dan Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut diatas, maka seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan Belanja Pensiun yang didanai dari APBN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan secara terpisah (Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN).

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun merupakan biaya yang dibebankan kepada Akumulasi Iuran Pensiun PNS atas penugasan Pemerintah kepada PT TASPEN (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun sesuai PMK 39/PMK.02/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 513/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) Tahun 2021 ditetapkan biaya satuan Tahun 2021 adalah sebesar Rp19.984,- per penerima manfaat pensiun dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021

Sebagai BUMN yang mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN terus berkomitmen kepada pesertanya untuk terus memberikan layanan terbaiknya dengan 4 (empat) Program perlindungan yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). TASPEN juga memberikan perlindungan kepada pegawai Non ASN dan Non PPPK yang bertugas pada

Instansi Pemerintah sesuai UU ASN No 5 Tahun 2014 dan PP No 49 Tahun 2018. TASPEN akan selalu memberikan layanan dan inovasi terbaiknya bagi Peserta baik itu ASN, Pejabat Negara dan Non ASN di seluruh Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang telah terjadi dalam kurun hampir 2 tahun ini tidak mengurangi komitmen TASPEN untuk tetap cepat dan tanggap menyesuaikan mekanisme pelayanan dan pola kerja karyawan di tengah pandemik COVID-19. Langkah sigap yang diambil bagi peserta adalah TASPEN PESONA (Tanggap Andal Sehatkan Personil untuk Pelayanan Bebas Corona) dimana peserta dapat mengajukan klaim melalui layanan e-klaim pada website [www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id) yang dilanjutkan dengan verifikasi online serta pengambilan hak dapat dilakukan melalui ATM. Selain itu, layanan lainnya adalah TASPEN Care untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan, serta TASPEN Otentikasi untuk melakukan otentikasi mandiri melalui aplikasi smartphone. TASPEN tetap melayani layanan tatap muka di kantor cabang, dengan jadwal yang sudah ditentukan dan pemberlakuan protokol pelayanan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan bagi peserta diantaranya penerapan 3M, pengecekan suhu tubuh, dan pengaturan jarak kursi duduk dan antrian.

Demikian Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 ini kami sampaikan sebagai informasi tentang kegiatan dan kinerja Perusahaan secara menyeluruh berdasarkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan iuran pensiun dan pembayaran pensiun. Semoga dapat memberikan manfaat, baik untuk perencanaan maupun pengendalian dimasa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
 BAB I      PENDAHULUAN	
A. Program Pensiun PT TASPEN (Persero).....	1
B. Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Serta Ringkasan Hasil Pengelolaan Dana Pensiun .....	4
 BAB II      LAPORAN KEGIATAN	
A. Aspek Operasional .....	13
1. Jumlah Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Pengembalian Nilai Tunai .....	13
2. Pembebanan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun.....	17
3. Sumber Daya Manusia .....	19
B. Aspek Keuangan .....	20
1. Dana Bersih.....	20
2. Penambahan Dana.....	26
3. Pengurangan Dana.....	29
4. Dana Bersih Akhir Periode.....	30
C. Aspek Investasi .....	32
1. Penempatan Investasi.....	32
2. Hasil Investasi.....	33
3. Beban Investasi .....	34
4. Realisasi Tingkat Pengembalian Hasil Investasi (Yield on investment/YOI).....	35
5. Karakteristik dan Risiko tiap Jenis Investasi.....	36
 BAB III      LAPORAN ADMINISTRATIF PROGRAM DANA BELANJA Pensiun APBN .....	41
A. Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun.....	41
B. Penyelesaian Klaim .....	50
C. Jumlah Aset atau Liabilitas serta Sisa Dana Belanja Pensiun.....	50
D. Pembayaran Manfaat Pensiun APBN.....	53
 BAB IV      PENUTUP.....	55
A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Pertimbangan dan Dukungan Kementerian Keuangan.....	55
B. Kesimpulan .....	57

DAFTAR TABEL

NO TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 1	Komposisi Sharing Pembayaran Manfaat Pensiun PNS	2
Tabel 2	Laporan Dana Bersih Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	5
Tabel 3	Penyelesaian Keluhan Pelanggan Januari sampai Desember 2021	6
Tabel 4	Ikhtisar Pengelolaan Program Pensiun Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	11
Tabel 5	Jumlah Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	13
Tabel 6	Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kantor Cabang untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	14
Tabel 7	Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun Semester II Tahun 2021	15
Tabel 8	Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun Semester II Tahun 2021	16
Tabel 9	BOP Pembayaran Manfaat Pensiun untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	17
Tabel 10	BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	18
Tabel 11	Data Karyawan PT TASPEN (Persero) untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	19
Tabel 12	Jumlah Karyawan Diperbantukan/Diperkerjakan untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	19
Tabel 13	Dana Bersih Akumulasi Iuran Program Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	20
Tabel 14	Nilai Deposito untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	21
Tabel 15	Nilai Surat Utang Negara untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	22
Tabel 16	Nilai Sukuk Pemerintah untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	23
Tabel 17	Nilai Sukuk Korporasi untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	23
Tabel 18	Nilai Reksadana untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	24

Tabel 19	Jumlah Penambahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	27
Tabel 20	Pengurangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk Periode pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	29
Tabel 21	Perubahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	30
Tabel 22	Penempatan Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	32
Tabel 23	Hasil Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	33
Tabel 24	Beban Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	34
Tabel 25	Rincian Beban Investasi Juli sampai dengan Desember 2021	35
Tabel 26	Jumlah Penerimaan dan Pembayaran Manfaat Pensiun Menurut Kelompok Pensiun untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	41
Tabel 27	Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Menurut Jenis Pensiun untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	45
Tabel 28	Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Menurut Kelompok Pensiun pada Kantor Cabang untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	46
Tabel 29	Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Menurut Jenis Pensiun pada Kantor Cabang untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	48
Tabel 30	Jumlah Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Pensiun untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	50
Tabel 31	Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	51
Tabel 32	Pembayaran Manfaat Pensiun APBN untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021	54



## **DAFTAR GRAFIK**

1. Grafik 1 Proporsi Penempatan Investasi Semester II Tahun 2021 ..... . 33
2. Grafik 2 Proporsi Hasil Investasi Semester II Tahun 2021 ..... . 34
3. Grafik 3 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Semester II Tahun 2021..... . 44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN PENDUKUNG**

1. Lampiran I  
Laporan Dana Bersih untuk Periode yang Berakhir  
Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 ..... 61
2. Lampiran II  
Laporan Perubahan Dana Bersih untuk Periode yang Berakhir  
Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021. .... 62
3. Lampiran III  
Laporan Arus Kas untuk Periode yang Berakhir  
Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021. .... 63

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Program Pensiun PT TASPEN (Persero)**

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, dan Besarnya iuran-luran yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, maka untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran dari penghasilan setiap bulannya termasuk didalamnya iuran dana pensiun. Iuran dana pensiun tersebut oleh Pemerintah disimpan pada Bank milik Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Akumulasi iuran Pensiun adalah kumpulan dana yang merupakan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara beserta hasil pengembangannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, maka iuran dana pensiun pegawai negeri yang selama ini dititipkan kepada Pemerintah dan ditempatkan pada bank-bank Pemerintah dialihkan penitipannya kepada PT TASPEN (Persero) sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-335/MK.02/2011 tanggal 20 Juni 2011, akumulasi iuran dana pensiun selain ditempatkan pada bank-bank Pemerintah juga dapat ditempatkan pada obligasi milik Pemerintah. Pengadministrasian dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.02/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2020 sebagai pengganti atas dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.02/2016, tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Selain mengelola Iuran Dana Pensiun PNS, mulai tahun 1987 Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan pembayaran pensiun yang semula dilakukan melalui Kantor Kas Negara Departemen Keuangan kepada Perseroan secara bertahap.

- a. Pensiun di wilayah Bali, NTB, NTT terhitung 1 Januari 1987 melalui surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1.841 tanggal 13 Oktober 1986.
- b. Pensiun di wilayah Sumatera terhitung 1 Januari 1988 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-1402 tanggal 14 November 1987.

- c. Pensiun di wilayah Jawa dan Madura terhitung 1 Januari 1989 melalui Surat Keputusan Menteri keuangan Nomor : 812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-755 tanggal 27 September 1988.
- d. Pensiun di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur terhitung 1 April 1990 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990.

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan Undang-undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sistem *pay as you go*. Dalam perkembangannya pembayaran pensiun PNS selain dari APBN, sejak Tahun 1994 juga bersumber dari akumulasi Dana Pensiun PNS, namun sejak Tahun 2009 sepenuhnya (100%) bersumber dari APBN. Komposisi sharing Pembayaran Manfaat Pensiun PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Komposisi Sharing Pembayaran Manfaat Pensiun PNS

(Dalam Milliar Rupiah)

No	Periode	Sharing		Keterangan
		APBN	AIP PNS	
1	Januari - Maret 1994	0%	100%	684,48 SK Menkeu No. 1204/MK.03/1993
2	April - Desember 1994	77,5%	22,50%	462,03 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
3	Januari - Desember 1995	77,5%	22,50%	761,00 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
4	Januari - Desember 1996	77,5%	22,50%	921,88 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
5	Januari - Maret 1997	77,5%	22,50%	1.106,78 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
6	April - Desember 1997	77%	23%	Surat DJA No. S-993/A/67/0297
7	Januari - Desember 1998	77%	23%	1.443,70 Surat DJA No. S-993/A/67/0297
8	Januari - Desember 1999	75%	25%	2.116,44 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
9	Januari - Desember 2000	75%	25%	1.750,61 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
10	Januari - Desember 2001	75%	25%	3.367,91 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
11	Januari - Desember 2002	75%	25%	3.394,75 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
12	Januari - Desember 2003	79%	21%	3.391,81 Surat Menkeu No. S-6878/MK.02/2002
13	Januari - Desember 2004	79%	21%	3.368,83 Surat Menkeu No. S-6878/MK.02/2002
14	Januari - Desember 2005	79%	21%	3.609,06 Surat Menkeu No. S-6878/MK.02/2002
15	Januari - Desember 2006	82,5%	17,50%	3.772,13 Surat Menkeu No. S-07/MK.02/2006
16	Januari - Desember 2007	85,5%	14,50%	3.386,23 Surat Menkeu No. S-03/MK.02/2007
17	Januari - Desember 2008	91%	9%	2.473,86 Surat Menkeu No. S-05/MK.02/2008
Jumlah			36.011,52	

Penggunaan Dana Akumulasi iuran Pensiun selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberlakukan sejak tanggal 31 Mei 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.02/2017 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

**Kelompok Penerima Pensiun terdiri dari:**

- a. Pensiun Pejabat Negara;
- b. Pensiun Hakim;
- c. Pensiun PNS Pusat;
- d. Pensiun PNS Daerah;
- e. Pensiun PNS Eks Pegadaian;
- f. Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI;
- g. Pensiun TNI/POLRI (eks ABRI yang pensiun sebelum tanggal 1 April 1989);
- h. Tunjangan Veteran;
- i. Dana Kehormatan Veteran;
- j. Tunjangan PKRI/KNIP.

**Jenis Pensiun terdiri dari:**

- a. Pensiun Sendiri;
- b. Pensiun Janda/Duda;
- c. Pensiun Yatim Piatu;
- d. Pensiun Orang Tua.

**Hak-hak Peserta Program Pensiun ;**

- 1) Pensiun Sendiri  $(2,4\% \times \text{Gaji Pokok} \times \text{Masa Kerja}) + \text{Tunjangan}$  ;
- 2) Pensiun Janda / Duda  $(36\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan})$  ;
- 3) Pensiun Yatim / Piatu  $(36\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan})$  ;
- 4) Pensiun Orang Tua  $(20\% \times 72\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan})$  ;
- 5) Uang Duka Wafat (UDW) sebesar 3 x Penghasilan.

Bagi peserta yang berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar tanpa hak pensiun) memperoleh hak berupa pengembalian iuran pensiun (4,75%) beserta pengembangannya.

**Kewajiban Peserta dan Penerima Manfaat Program Pensiun :**

- a. Peserta Aktif
  - Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
  - Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.
- b. Penerima Manfaat Program Pensiun
  - Melaporkan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.

**Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS**

Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:39/PMK.02/2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero). PMK tersebut mencabut PMK Nomor: 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjadi menggunakan unit cost.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513 /KMK.02.2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) Tahun 2021 yang telah menetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan pembayaran manfaat

pensiun yang dilaksanakan PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2021 sebesar Rp 691.275.368.730,- dan Biaya Satuan untuk tahun 2021 sebesar Rp 19.984,- per penerima manfaat pensiun per bulan dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021.

## **B. Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara**

### **1. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan**

Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 ini disampaikan kepada Menteri Keuangan RI c.q Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, sesuai dengan pasal 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.02/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya Nomor : 243/PMK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016.

### **2. Latar Belakang Pelaporan**

Guna memenuhi kewajiban sebagai Badan Penyelenggara Dana Iuran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, maka PT TASPEN (Persero) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 dalam rangka pengawasan atas pengadministrasian penitipan dana yang berasal dari iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

### **3. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting**

#### **a. Periode Pelaporan**

Laporan Semester II Tahun 2021 Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara ini merupakan informasi mengenai PT TASPEN (Persero) dan penjabaran laporan kegiatan yang memuat aspek-aspek operasional, keuangan, investasi dan operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

#### **b. Kejadian Penting**

Beberapa kejadian dan kegiatan penting pada Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **1) Pertumbuhan Total Aset dan Kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara**

##### **a) Total Aset Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara**

Sampai dengan Semester II Tahun 2021, Nilai Total Aset Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara sebesar Rp190.010.699.628.497,-. Jika dibandingkan dengan kondisi per Semester I Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar Rp13.168.729.676.847,- atau naik 7,45%.

Total Aset tersebut terdiri dari ;

- Aset Investasi sebesar Rp180.206.634.969.589,- meningkat sebesar Rp6.229.883.960.328,- atau naik sebesar 3,58% bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021;
- Aset Bukan Investasi sebesar Rp9.804.064.658.908,- mengalami peningkatan sebesar Rp6.938.845.716.519,- atau naik 242,18% bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021.

- b) Total Kewajiban dan Dana Bersih  
Total Kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp173.774.307.505,- atau mengalami penurunan sebesar Rp49.698.421.967,- atau turun 22,24% jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021.
- c) Sedangkan Pencapaian Total Dana Bersih yang merupakan selisih dari Total Aset dan Total Kewajiban pada Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp189.836.925.320.992,- atau naik sebesar Rp13.218.428.098.814,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,48% sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2  
Laporan Dana Bersih Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara  
Untuk Periode yang Berakhir pada  
Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021	Rupiah
			% Naik Turun
Aset Investasi	180.206.634.969.589	173.976.751.009.261	3,58
Aset Bukan Investasi	9.804.064.658.908	2.865.218.942.389	242,18
<b>Total Aset</b>	<b>190.010.699.628.497</b>	<b>176.841.969.951.650</b>	<b>7,45</b>
Kewajiban	173.774.307.505	223.472.729.472	(22,24)
<b>Total Dana Bersih</b>	<b>189.836.925.320.992</b>	<b>176.618.497.222.178</b>	<b>7,48</b>

Sumber : Accounting Division

## 2) Peningkatan Pelayanan

### a) Upaya yang Telah dan Sedang Dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan guna meningkatkan kualitas dan perluasan pelayanan kepada peserta adalah dengan pengembangan *Delighted Customer Services* (DCS) dalam bentuk *high quality services* diantaranya melalui Layanan Klaim Otomatis, *E-Channel Delivery Services* dan TASPEN PESONA “Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan dengan Pelayanan Bebas Corona” melalui layanan *e-klaim* TASPEN, TASPEN Care, dan aplikasi TASPEN Otentikasi.

### b) Sosialisasi KeTASPENan

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, yaitu media cetak dan media online. Saat ini TASPEN juga memaksimalkan penggunaan media sosial dalam melakukan sosialisasi, diantaranya sosialisasi TASPEN PESONA, TASPEN Mobile, TASPEN otentikasi dan lainnya.

**c) Penyelesaian Keluhan Pelanggan**

Tabel 3  
Penyelesaian Keluhan Pelanggan Januari sd Desember 2021

No	Jenis Keluhan	Jumlah Keluhan	Tindak Lanjut		Persentase Penyelesaian	Keterangan
			Selesai	Belum Selesai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penipuan	5	5	-	100%	Selesai
2	Pembayaran	1.595	1.595	-	100%	Selesai
3	Persyaratan	371	371	-	100%	Selesai
4	Kepesertaan	209	209	-	100%	Selesai
5	Alamat	90	90	-	100%	Selesai
6	Klaim	414	414	-	100%	Selesai
7	Mutasi	18	18	-	100%	Selesai
8	Lain-lain	1.440	1.440	-	100%	Selesai

**d) Press Realease**

Pelaksanaan Press Release yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2021 diantaranya adalah meraih penghargaan The Best Brand Image in Mandatory Insurance Category, bersama dengan Pemkab Pasaman Barat Bersinergi Tingkatkan Kesejahteraan Karyawan Non-ASN dan Non-PPPK, menyerahkan bantuan Mobil Ambulans Multifungsi Kepada Kementerian BUMN, bersinergi dengan Negara-Negara di Asia Terkait Pengelolaan ASN menyerahkan 4 Unit Ambulans, menerima Anugerah KORPRI Award 2021, Salurkan Bantuan kepada Korban Erupsi Gunung Semeru, MENPAN-RB Resmikan TASPEN Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Bandung, menyalurkan bantuan Digitalisasi Pendidikan di Tangerang dan Rp110 Juta kepada Korban Erupsi Gunung Semeru.

**e) Peningkatan Validasi dan Akurasi Data**

Dalam rangka meningkatkan competitive advantage guna optimalisasi manajemen data peserta, PT TASPEN (Persero) melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- (1) Rekonsiliasi data peserta aktif dan penerimaan premi dilakukan setiap bulan (Internal Pra Rekonsiliasi), rekonsiliasi dengan instansi peserta dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Validasi Data Peserta Aktif periode 31 Desember 2021 mencapai 99,62% (deviasi  $\leq 0,15\%$ ).
- (2) Validasi Data Pensiun sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai 99,99% deviasi  $\leq 0,15\%$ .
- (3) Akurasi Data PNS Pusat dan PNS Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai 99,97% (deviasi  $\pm 0,01\%$ ).



**C. Susunan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko dan Komite Investasi Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi, Komite Talenta Eksekutif dan Komite Aset Liabilitas.**

**1. Susunan Direksi PT TASPEN (Persero)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-37/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, sehingga Susunan Nama Direksi secara lengkap dan Jabatan adalah :

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	ANTONIUS N.S. KOSASIH	DIREKTUR UTAMA	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
2	MOHAMMAD JUFRI	DIREKTUR OPERASIONAL	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
3	PATAR SITANGGANG	DIREKTUR KEUANGAN	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
4	WAHYU TRI RAHMANTO	DIREKTUR PERENCANAAN DAN AKTUARIA	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
5	RONY HANITYO APRIANTO	DIREKTUR INVESTASI	30 Januari 2020	30 Januari 2020	SK-37/MBU/01/2020
6	FEB SUMANDAR	DIREKTUR SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
7	DIYANTINI SOESILOWATI	DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO	30 Juni 2021	30 Juni 2021	SK-217/MBU/06/2021

**2. Susunan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-208/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, sehingga Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut ;

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	SUHARDI ALIUS	KOMISARIS UTAMA	15 Juni 2020	15 Juni 2020	SK-203/MBU/06/2020
2	MARDIASMO	KOMISARIS INDEPENDEN	15 Juni 2020	15 Juni 2020	SK-203/MBU/06/2020
3	M. EDHIE PURNAWAN	KOMISARIS INDEPENDEN	29 Mei 2019	29 Mei 2019	SK-118/MBU/05/2019
4	LILIEK MAYASARI	KOMISARIS	29 Mei 2019	29 Mei 2019	SK-118/MBU/05/2019
5	BIMA HARIA WIBISANA	KOMISARIS	09 September 2016	09 September 2016	SK-226/MBU/09/2016
6	DWI WAHYU ATMAJI	KOMISARIS	09 September 2016	09 September 2016	SK-226/MBU/09/2016

**3. Susunan Komite Audit PT TASPEN (Persero)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : KEP-04/DK-TASPEN/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	MARDIASMO (Komisaris Independen)	KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TASPEN/072020
2	LILIEK MAYASARI (Komisaris)	WAKIL KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TASPEN/072020
3	HENNY IRNIAWAN	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TASPEN/072020
4	DARIUS	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TASPEN/072020

#### 4. Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : KEP-14/DK-TASPEN/072020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero), Nomor : KEP-15/DK-TASPEN/072020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan KEP-05/DK-TASPEN/072021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	M. EDHIE PURNAWAN	KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-15/DK-TASPEN/072020
2	BIMA HARIA WIBISANA	WAKIL KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-15/DK-TASPEN/072020
3	SIGIT ROHMADI	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-15/DK-TASPEN/072020
4	JANI ARJANTO	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-15/DK-TASPEN/072020
5	ETTTA RUSDIANA PUTRA	ANGGOTA	01 Juli 2021	01 Juli 2021	KEP-05/DK-TASPEN/072021

#### 5. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (KPMR)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : KEP-06/DK-TASPEN/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	SUHARDI ALIUS	KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TASPEN/072020
2	DWI WAHYU ATMAJI	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TASPEN/072020
3	MUH. DARMIN AHMAD PELL	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TASPEN/072020
4	AMRIZAL	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TASPEN/072020

#### 6. Komite Investasi

Berdasarkan Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor: PD-19A/DIR/2019 tanggal 24 Mei 2019, tentang Komite Investasi PT TASPEN (Persero), susunan Komite Investasi PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Investasi (merangkap anggota inti)
Sekretaris	: Fungsional Tertinggi pada Divisi Analisis Investasi
Anggota Inti	: a) Direktur Keuangan b) Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko c) Direktur yang membawahi fungsi Aktuaria
Anggota Pendukung	: a) <i>Corporate Actuary</i> b) Unit Kerja Terkait (jika diperlukan) c) Konsultan Independen/ KJPP/ MI (jika diperlukan)

Jika terdapat kekosongan jabatan fungsional tertinggi atau terdapat fungsional tertinggi lebih dari 1 (satu) orang pada *Investment Analyst Division*, maka Ketua Komite Investasi berhak menunjuk Sekretaris Komite pada *Investment Analyst Division* yang direkomendasikan oleh *Investment Analyst Division Head*.

Pembentukan Komisi Investasi ini dimaksudkan agar dana yang dikelola dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan prinsip aman, hasil, likuid dan fleksibilitas.

#### 7. Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi

Berdasarkan Keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor : KD-36/DIR/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi, susunan Komite PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur SDM dan Teknologi Informasi
Wakil Ketua	: Direktur Operasional
Sekretaris	: <i>Information Technology Division Head</i>
Anggota	: a) <i>Accounting Division Head</i> b) <i>Membership Division Head</i> c) <i>Services And Marketing Division Head</i> d) <i>Procurement&amp;Maintenance Division Head</i> e) <i>Strategic Planning&amp;Bus. Dev. Div Head</i> f) <i>Treasury Division Head</i> g) <i>Legal Division Head</i> , dan h) <i>Budgeting &amp; Performance Analysis Desk Head</i>

Pembentukan Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi ini bertujuan untuk mencapai akurasi dan validitas data serta memastikan penerapan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan proses bisnis perusahaan dapat tercapai sesuai rencana strategis (*Strategic Plan*) Perusahaan dan arahan Pemegang Saham.

#### 8. Komite Talenta Eksekutif PT TASPEN (Persero)

Berdasarkan Keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor : KD- 7/DIR/2020 Tentang Komite Talenta Eksekutif PT TASPEN (Persero), susunan Komite Talenta Eksekutif PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Direktur SDM dan Teknologi Informasi
Anggota	: a) Direktur Operasi b) Direktur Keuangan c) Direktur Investasi d) Direktur Perencanaan dan Aktuaria e) Human Capital Division Head

Pembentukan Komite Talenta Eksekutif ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan strategis Manajemen Talenta, menetapkan program pengembangan bagi suksesor dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas, merumuskan serta menetapkan pergerakan karir talenta (*talent mobility*).

9. Komite Aset Liabilitas PT TASPEN (Persero)

Berdasarkan Keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor : KD- 53/DIR/2020 Tentang Komite Aset Liabilitas PT TASPEN (Persero), susunan Komite Aset Liabilitas PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur yang membawahi unit kerja Manajemen Risiko
Sekretaris	: Pejabat Fungsional tertinggi pada Divisi Manajemen Risiko
Anggota Inti	: a) Direktur yang membawahi fungsi Investasi b) Direktur yang membawahi fungsi Perbendaharaan c) Direktur yang membawahi fungsi Aktuaria
Anggota Pendukung	: Unit kerja terkait (jika diperlukan)

Pembentukan Komite Aset Liabilitas ini bertujuan untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mendukung kemampuan Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban kepada peserta sesuai jatuh tempo serta untuk mencapai tujuan keuangan Perusahaan dan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi dalam pengambilan keputusan strategis terkait aset dan liabilitas Perusahaan di dalam batasan-batasan dan toleransi risiko yang ditentukan oleh Perusahaan.

**D. Ringkasan Pengelolaan Program Pensiun**

Sebagai gambaran secara Ringkasan Pengelolaan Program Pensiun untuk Semester II Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Ikhtisar Pengelolaan Program Pensiun**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021**

URAIAN	SATUAN	RKA 2021	REALISASI		% Capaian 2021	% Naik Turun
			31 Desember 2021 (Semester II)	30 Juni 2021 (Semester I)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I Program Pensiun</b>						
1. Penerima Pensiun	orang	2.965.724	2.847.034	2.845.269	96,00	0,06
2. Penyelesaian Klaim	kejadian	547.864	346.479	332.378	63,24	4,24
3. Penyelesaian Klaim Pengembalian Nilai Tunai	kejadian	3.761	1.323	1.346	35,18	(1,71)
4. Pembayaran						
a. Pengembalian Nilai Tunai	Rp	154.214.852.326	54.229.053.825	51.438.114.943	35,16	5,43
b. Manfaat Pensiun Dana APBN*)	Rp	111.048.830.473.752	48.488.824.421.690	62.137.129.294.113	43,66	(21,96)
<b>II Keuangan</b>						
1. Aset	Rp	184.780.360.873.904	190.010.699.628.497	176.841.969.951.650	102,83	7,45
2. Liabilitas	Rp	143.970.308.477	173.774.307.505	223.472.729.472	120,70	(22,24)
3. Penambahan	Rp	23.739.862.579.342	14.078.486.144.553	5.962.169.340.494	59,30	136,13
4. Pengurangan	Rp	1.723.865.917.411	866.730.585.739	789.415.153.843	50,28	9,79
5. Peningkatan/Penurunan Dana Bersih	Rp	22.015.996.661.931	13.211.755.558.814	5.172.754.186.651	60,01	155,41
6. Dana Bersih Awal Periode	Rp	162.620.393.903.496	176.618.497.222.178	171.445.743.035.527	108,61	3,02
7. Dana Bersih Akhir Periode	Rp	184.636.390.565.427	189.836.925.320.992	176.618.497.222.178	102,82	7,48
<b>III Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN</b>						
1. Aset	Rp	9.513.525.768.391	8.901.888.510.265	9.157.112.699.349	93,57	(2,79)
2. Liabilitas	Rp	8.323.170.293.985	7.899.627.543.083	202.004.103.988	94,91	3.810,63
3. Sisa Dana Belanja Pensiun Tahun Lalu	Rp	1.190.355.474.406	8.955.108.595.361	1.046.230.553.909	752,31	755,94
4. Penambahan	Rp	111.399.012.758.709	41.031.471.795.962	70.484.047.922.488	36,83	(41,79)
5. Pengurangan	Rp	111.399.012.758.709	48.984.319.424.141	62.575.169.881.036	43,97	(21,72)
6. Sisa Dana Belanja Pensiun	Rp	1.190.355.474.406	1.002.260.967.182	8.955.108.595.361	84,20	(88,81)
7. Liabilitas dan Sisa Dana Belanja Pensiun	Rp	9.513.525.768.391	8.901.888.510.265	9.157.112.699.349	93,57	(2,79)

Sumber : Accounting Division & Membership Division

#### 1. Alamat Kantor Pusat PT TASPEN (Persero)

Kantor Pusat PT TASPEN (Persero) berkedudukan di Jl. Letjen Suprpto No. 45 Cempaka Putih - Jakarta Pusat 10520 Telp. (021) 4241808 Fax. (021) 4203809.

#### 2. Pernyataan Isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Menjadi Tanggung Jawab PT TASPEN (Persero)

Dengan terbitnya laporan ini, dinyatakan bahwa isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 ini merupakan tanggung jawab PT TASPEN (Persero) selaku Badan Penyelenggara dari Penitipan Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN  
PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA  
SEMESTER II TAHUN 2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A.N.S. Kosasih  
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprpto No. 45 - Cempaka Putih Jakarta Pusat  
10520 DKI Jakarta  
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa ;

1. Direksi PT TASPEN (Persero) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Semester II Tahun 2021 pengelolaan akumulasi iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara;
2. Laporan keuangan Semester II Tahun 2021 pengelolaan akumulasi iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Semua informasi dalam laporan Semester II Tahun 2021 pengelolaan akumulasi iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara telah dimuat secara lengkap dan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2022

  
A.N.S. Kosasih  
Direktur Utama

## BAB II LAPORAN KEGIATAN

Laporan Akumulasi Iuran PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan kegiatan selama Juli sampai dengan Desember 2021 yang memuat penjabaran aspek-aspek operasional, keuangan, dan investasi. Untuk dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut, berikut ini disajikan laporan kegiatan dan realisasi yang dijabarkan dalam aspek-aspek tersebut diatas.

### A. ASPEK OPERASIONAL

#### 1. Jumlah Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Pengembalian Nilai Tunai

Realisasi penyelesaian klaim Pengembalian Iuran 4,75% Nilai Tunai yang dibayarkan melalui Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP) pada Semester II Tahun 2021 sebanyak 1.323 kejadian atau mencapai 35,18% dari RKA Tahun 2021 dengan nilai pembayarannya sebesar Rp54.229.053.825,-. Jika dibandingkan dengan realisasi periode Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,71% atau sebanyak 23 kejadian dan nilai pembayaran naik sebesar Rp2.790.938.882,- atau mengalami kenaikan sebesar 5,43%.

Jumlah penyelesaian pengembalian nilai tunai dan realisasi pembayaran pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5  
Jumlah Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

Kegiatan dan Rujukan

URAIAN	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian Semester II 2021		% Naik/Turun	
			Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021					
	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4/2)	(9=5/3)	(10=4/6)	(11=7/5)
Pengembalian Iuran 4,75% (SP3IP)	3.761	154.214.852.326	1.323	54.229.053.825	1.346	51.438.114.943	35,18	35,16	(1,71)	5,43
JUMLAH	3.761	154.214.852.326	1.323	54.229.053.825	1.346	51.438.114.943	35,18	35,16	(1,71)	5,43

Sumber : Accounting Division & Membership Division

Rekapitulasi jumlah penyelesaian klaim dan jumlah pembayaran manfaat pengembalian nilai tunai pada masing-masing Kantor Cabang Utama/Cabang pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6**  
**Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kantor Cabang**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021**

NO	KANTOR CABANG	BA	Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021	
			Kejadian	Jumlah Pembayaran Rp	Kejadian	Jumlah Pembayaran Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	JAKARTA	100	146	5.454.177.000	179	4.983.890.839
2	BANDAR LAMPUNG	101	11	385.893.100	15	589.228.187
3	BENGKULU	102	18	631.121.500	24	1.189.845.622
4	PALEMBANG	103	40	1.716.719.400	28	1.195.252.394
5	PALANGKARAYA	104	32	898.716.800	23	775.409.846
6	PONTIANAK	105	30	1.328.958.700	21	758.523.000
7	PANGKAL PINANG	106	9	243.766.900	23	698.728.198
8	TANGERANG	107	21	963.344.400	14	605.958.665
9	TARAKAN	108	6	179.626.700	2	38.740.085
10	JAKARTASELATAN	109	12	325.030.600	27	672.168.761
11	LUBUK LINGGAU	110	7	299.518.000	12	529.239.224
12	MEDAN	200	40	1.674.508.500	35	1.382.267.200
13	BANDA ACEH	201	15	446.351.600	17	657.636.400
14	PEMATANG SIANTAR	202	25	869.929.099	20	940.913.400
15	BUKITTINGGI	203	8	348.730.700	9	296.850.200
16	PADANG	204	12	568.249.000	15	539.105.091
17	PEKANBARU	205	45	1.826.110.700	45	2.044.764.703
18	JAMBI	206	17	649.026.600	32	1.251.646.700
19	TANJUNG PINANG	207	17	627.515.600	17	598.695.254
20	LHOKSEUMAWE	208	9	462.112.300	16	695.273.200
21	KEPULAUAN NIAS	209	7	229.330.600	3	143.398.533
22	BANDUNG	300	31	1.029.478.700	40	1.411.187.535
23	BOGOR	301	38	1.872.593.517	29	1.180.344.382
24	TASIKMALAYA	302	9	365.166.300	12	557.339.671
25	CIREBON	303	4	128.468.000	4	51.992.500
26	SERANG	304	20	906.386.200	15	740.400.000
27	DEPOK	305	10	476.591.100	10	288.207.500
28	BEKASI	306	11	286.875.200	11	314.165.674
29	SEMARANG	400	30	1.476.469.700	37	1.669.155.562
30	PURWOKERTO	401	19	579.040.800	13	355.306.429
31	SURAKARTA	402	16	657.815.323	40	1.428.747.500
32	YOGYAKARTA	403	10	267.685.600	13	421.351.398
33	PEKALONGAN	404	14	603.034.200	22	893.460.701
34	SURABAYA	500	58	2.456.978.126	40	1.700.888.500
35	MALANG	501	31	1.350.976.800	29	1.167.556.200
36	MADIUN	502	16	613.163.555	18	863.779.720
37	KEDIRI	503	41	2.255.950.000	39	2.115.706.800
38	JEMBER	504	32	1.759.494.100	12	488.136.461
39	BANJARMASIN	505	9	343.300.400	33	1.116.955.626
40	SAMARINDA	506	42	1.562.133.200	49	1.963.131.482
41	ENDE	507	15	461.831.000	12	308.533.800
42	PAMEKASAN	508	18	821.840.600	12	499.436.000
43	MAKASSAR	600	41	1.695.602.300	38	1.636.586.125
44	MANADO	601	42	1.845.217.500	28	1.339.602.637
45	PALU	602	33	1.553.645.405	24	925.095.800
46	KENDARI	603	16	750.467.600	10	423.921.800
47	AMBON	604	11	479.360.800	6	153.074.200
48	JAYAPURA	605	24	906.666.900	29	1.116.350.580
49	GORONTALO	606	23	987.583.900	16	631.196.307
50	TERNATE	607	7	279.423.500	13	478.656.955
51	MAMUJU	608	13	536.014.300	8	223.242.900
52	MANOKWARI	609	16	525.693.500	9	340.435.300
53	PALOPO	610	14	712.640.500	13	393.257.324
54	BONE	611	20	959.609.454	18	797.203.600
55	DENPASAR	700	21	967.948.700	22	987.194.361
56	KUPANG	701	21	745.720.146	24	1.063.873.800
57	MATARAM	702	20	879.449.100	21	805.104.311
Jumlah			1.323	54.229.053.825	1.346	51.438.114.943

Sumber : Accounting Division & Membership Division



**Tabel 7**  
**Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun**  
**Semester II Tahun 2021**

Rupiah

NO	KANTOR CABANG	PNS PUSAT	PNS DO	PNS PERBANTUAN	PEJABAT NEGARA	PENGEMBALIAN SP3IP	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	JAKARTA	3.778.632.900	1.547.379.800	128.164.300	-	-	5.454.177.000
2	BANDAR LAMPUNG	30.153.800	355.739.300	-	-	-	385.893.100
3	BENGKULU	216.370.000	414.751.500	-	-	-	631.121.500
4	PALEMBANG	432.578.300	1.284.141.100	-	-	-	1.716.719.400
5	PALANGKARAYA	52.540.700	846.176.100	-	-	-	898.716.800
6	PONTIANAK	308.186.300	1.020.772.400	-	-	-	1.328.958.700
7	PANGKAL PINANG	21.444.900	222.322.000	-	-	-	243.766.900
8	TANGERANG	362.862.200	600.482.200	-	-	-	963.344.400
9	TARAKAN	89.222.800	90.403.900	-	-	-	179.626.700
10	JAKARTASELATAN	191.439.400	133.591.200	-	-	-	325.030.600
11	LUBUK LINGGAU	-	299.518.000	-	-	-	299.518.000
12	MEDAN	313.523.700	1.360.984.800	-	-	-	1.674.508.500
13	BANDA ACEH	82.988.900	363.362.700	-	-	-	446.351.600
14	PEMATANG SIANTAR	16.905.800	853.023.299	-	-	-	869.929.099
15	BUKITTINGGI	35.778.100	312.952.600	-	-	-	348.730.700
16	PADANG	-	568.249.000	-	-	-	568.249.000
17	PEKANBARU	98.598.300	1.727.512.400	-	-	-	1.826.110.700
18	JAMBI	135.732.400	513.294.200	-	-	-	649.026.600
19	TANJUNG PINANG	249.429.000	378.086.600	-	-	-	627.515.600
20	LHOKSEUMAWE	107.255.800	354.856.500	-	-	-	462.112.300
21	KEPULAUAN NIAS	-	229.330.600	-	-	-	229.330.600
22	BANDUNG	382.497.800	646.980.900	-	-	-	1.029.478.700
23	BOGOR	551.002.600	1.321.590.917	-	-	-	1.872.593.517
24	TASIKMALAYA	44.168.800	320.997.500	-	-	-	365.166.300
25	CIREBON	-	128.468.000	-	-	-	128.468.000
26	SERANG	154.447.500	751.938.700	-	-	-	906.386.200
27	DEPOK	269.920.600	206.670.500	-	-	-	476.591.100
28	BEKASI	87.913.000	198.962.200	-	-	-	286.875.200
29	SEMARANG	248.334.400	1.228.135.300	-	-	-	1.476.469.700
30	PURWOKERTO	149.545.600	429.495.200	-	-	-	579.040.800
31	SURAKARTA	270.709.223	387.106.100	-	-	-	657.815.323
32	YOGYAKARTA	48.517.900	146.898.100	72.269.600	-	-	267.685.600
33	PEKALONGAN	99.018.500	504.015.700	-	-	-	603.034.200
34	SURABAYA	377.502.600	2.008.275.526	71.200.000	-	-	2.456.978.126
35	MALANG	325.440.100	1.025.536.700	-	-	-	1.350.976.800
36	MADIUN	158.437.000	454.726.555	-	-	-	613.163.555
37	KEDIRI	133.406.300	2.122.543.700	-	-	-	2.255.950.000
38	JEMBER	204.324.200	1.555.169.900	-	-	-	1.759.494.100
39	BANJARMASIN	60.926.900	282.373.500	-	-	-	343.300.400
40	SAMARINDA	186.610.600	1.375.522.600	-	-	-	1.562.133.200
41	ENDE	-	461.831.000	-	-	-	461.831.000
42	PAMEKASAN	204.328.300	617.512.300	-	-	-	821.840.600
43	MAKASSAR	244.761.600	1.450.840.700	-	-	-	1.695.602.300
44	MANADO	169.263.700	1.639.757.500	36.196.300	-	-	1.845.217.500
45	PALU	89.948.600	1.463.696.805	-	-	-	1.553.645.405
46	KENDARI	103.787.400	646.680.200	-	-	-	750.467.600
47	AMBON	43.694.100	435.666.700	-	-	-	479.360.800
48	JAYAPURA	211.874.800	694.792.100	-	-	-	906.666.900
49	GORONTALO	57.132.800	930.451.100	-	-	-	987.583.900
50	TERNATE	138.259.600	141.163.900	-	-	-	279.423.500
51	MAMUJU	156.520.400	379.493.900	-	-	-	536.014.300
52	MANOKWARI	67.347.200	458.346.300	-	-	-	525.693.500
53	PALOPO	92.720.300	619.920.200	-	-	-	712.640.500
54	BONE	217.784.200	741.825.254	-	-	-	959.609.454
55	DENPASAR	193.643.700	774.305.000	-	-	-	967.948.700
56	KUPANG	-	701.504.046	44.216.100	-	-	745.720.146
57	MATARAM	212.543.500	643.513.800	23.391.800	-	-	879.449.100
Jumlah		12.479.977.123	41.373.638.602	375.438.100	-	-	54.229.053.825

Sumber : Accounting Division

**Tabel 8**  
**Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun**  
**Semester I Tahun 2021**

Rupiah							
NO	KANTOR CABANG	PNS PUSAT	PNS DO	PNS PERBANTUAN	PEJABAT NEGARA	PENGEMBALIAN SP3IP	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	JAKARTA	2.811.090.906	2.012.981.392	219.700.941	-	(59.882.400)	4.983.890.839
2	BANDAR LAMPUNG	243.315.590	345.912.597	-	-	-	589.228.187
3	BENGKULU	222.954.555	966.891.067	-	-	-	1.189.845.622
4	PALEMBANG	465.393.498	729.858.896	-	-	-	1.195.252.394
5	PALANGKARAYA	122.940.500	652.469.346	-	-	-	775.409.846
6	PONTIANAK	86.822.200	671.700.800	-	-	-	758.523.000
7	PANGKAL PINANG	65.381.122	633.347.076	-	-	-	698.728.198
8	TANGERANG	208.317.922	397.640.743	-	-	-	605.958.665
9	TARAKAN	-	38.740.085	-	-	-	38.740.085
10	JAKARTASELATAN	495.513.842	176.654.919	-	-	-	672.168.761
11	LUBUK LINGGAU	-	529.239.224	-	-	-	529.239.224
12	MEDAN	289.262.800	1.093.004.400	-	-	-	1.382.267.200
13	BANDA ACEH	32.214.600	657.807.000	-	-	(32.385.200)	657.636.400
14	PEMATANG SIANTAR	-	940.913.400	-	-	-	940.913.400
15	BUKITTINGGI	84.664.100	212.186.100	-	-	-	296.850.200
16	PADANG	165.847.431	373.257.660	-	-	-	539.105.091
17	PEKANBARU	205.461.212	1.839.303.491	-	-	-	2.044.764.703
18	JAMBI	212.930.000	1.038.716.700	-	-	-	1.251.646.700
19	TANJUNG PINANG	183.802.300	324.669.254	90.223.700	-	-	598.695.254
20	LHOKSEUMAWE	50.490.800	662.081.400	-	-	(17.299.000)	695.273.200
21	KEPULAUAN NIAS	-	143.398.533	-	-	-	143.398.533
22	BANDUNG	477.905.191	933.282.344	-	-	-	1.411.187.535
23	BOGOR	360.018.782	866.933.400	-	-	(46.607.800)	1.180.344.382
24	TASIKMALAYA	7.854.478	549.485.193	-	-	-	557.339.671
25	CIREBON	40.369.600	11.622.900	-	-	-	51.992.500
26	SERANG	46.545.800	693.854.200	-	-	-	740.400.000
27	DEPOK	201.213.700	86.993.800	-	-	-	288.207.500
28	BEKASI	99.232.044	259.885.130	-	-	(44.951.500)	314.165.674
29	SEMARANG	196.018.900	1.473.136.662	-	-	-	1.669.155.562
30	PURWOKERTO	189.614.235	160.111.594	-	5.580.600	-	355.306.429
31	SURAKARTA	367.244.600	1.061.502.900	-	-	-	1.428.747.500
32	YOGYAKARTA	199.359.849	221.991.549	-	-	-	421.351.398
33	PEKALONGAN	185.704.700	707.756.001	-	-	-	893.460.701
34	SURABAYA	558.150.100	1.118.592.900	24.145.500	-	-	1.700.888.500
35	MALANG	238.246.300	929.309.900	-	-	-	1.167.556.200
36	MADIUN	60.951.833	802.827.887	-	-	-	863.779.720
37	KEDIRI	276.538.400	1.839.168.400	-	-	-	2.115.706.800
38	JEMBER	78.811.600	409.324.861	-	-	-	488.136.461
39	BANJARMASIN	280.587.426	836.368.200	-	-	-	1.116.955.626
40	SAMARINDA	200.356.500	1.762.774.982	-	-	-	1.963.131.482
41	ENDE	33.299.500	275.234.300	-	-	-	308.533.800
42	PAMEKASAN	-	499.436.000	-	-	-	499.436.000
43	MAKASSAR	486.700.425	1.149.885.700	-	-	-	1.636.586.125
44	MANADO	209.299.500	1.130.303.137	-	-	-	1.339.602.637
45	PALU	93.728.500	831.367.300	-	-	-	925.095.800
46	KENDARI	43.257.900	380.663.900	-	-	-	423.921.800
47	AMBON	35.060.800	118.013.400	-	-	-	153.074.200
48	JAYAPURA	149.230.237	967.120.343	-	-	-	1.116.350.580
49	GORONTALO	164.750.003	466.446.304	-	-	-	631.196.307
50	TERNATE	130.437.866	348.219.089	-	-	-	478.656.955
51	MAMUJU	64.333.800	158.909.100	-	-	-	223.242.900
52	MANOKWARI	47.749.000	292.686.300	-	-	-	340.435.300
53	PALOPO	32.389.800	360.867.524	-	-	-	393.257.324
54	BONE	181.996.100	615.207.500	-	-	-	797.203.600
55	DENPASAR	97.573.650	848.555.611	41.065.100	-	-	987.194.361
56	KUPANG	57.242.500	1.006.631.300	-	-	-	1.063.873.800
57	MATARAM	160.518.878	644.585.433	-	-	-	805.104.311
Jumlah		11.998.695.875	39.259.829.127	375.135.241	5.580.600	(201.125.900)	51.438.114.943

Sumber : Accounting Division

## 2. Pembebanan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun

Akun ini merupakan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) terkait dengan Pembayaran Manfaat Pensiun dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun yang terdiri dari:

### a. BOP Pembayaran Manfaat Pensiun

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun merupakan biaya yang dibebankan kepada Akumulasi Iuran Pensiun PNS atas penugasan Pemerintah kepada PT TASPEN (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun sesuai PMK 39/PMK.02/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 513/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) Tahun 2021 ditetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp691.275.368.730,- dengan biaya satuan Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp19.984,- per penerima manfaat pensiun dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021.

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun PNS Semester II 2021 sebesar Rp352.701.841.025,- Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp23.046.604.770,- atau naik 6,99%. Realisasi BOP Pembayaran Manfaat Pensiun Semester II dan Semester I Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 9  
BOP Pembayaran Manfaat Pensiun  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021	% Naik/Turun
BOP Pembayaran Manfaat Pensiun	352.701.841.025	329.655.236.255	6,99
<b>JUMLAH</b>	<b>352.701.841.025</b>	<b>329.655.236.255</b>	<b>6,99</b>

Adapun rincian BOP Pembayaran Manfaat BOP sebagai berikut :

Bulan	Penerima Pensiun (Orang)	
Januari	2.815.502	
Februari	2.828.900	
Maret	2.821.133	
April	2.831.475	
Mei	2.840.288	
Juni	2.845.269	
Juli	2.857.043	
Agustus	2.861.703	
September	2.869.139	
Oktober	2.870.914	
November	2.856.770	
Desember	2.847.034	
<b>Total</b>	<b>34.145.170</b>	
BOP Tahun 2021 : Rp19.984,- x 34.145.170		682.357.077.280
BOP Semester I Tahun 2021 yang telah diakui		329.655.236.255
<b>BOP Semester II Tahun 2021</b>		<b>352.701.841.025</b>

**b. BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun**

BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Program THT yang dihitung berdasarkan rumus 6,7% dari hasil Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dikurangi dengan Beban Investasi per periode. Adapun realisasi BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 10  
BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021
(1)	Rp (2)	Rp (3)
Hasil Investasi		
1. Bunga Deposito	948.841.850.735	974.480.218.034
2. Bunga Obligasi :		
- Surat Utang Negara	3.153.036.441.941	2.926.861.386.966
- Obligasi Korporasi	717.909.638.885	782.150.666.674
3. Imbal Hasil Sukuk		
- Sukuk Pemerintah	984.421.807.644	890.958.353.779
- Sukuk Korporasi	4.618.751.199	4.192.188.092
4. Dividen Penyertaan	-	2.205.450.000
5. Bunga Medium Term Notes	1.072.000.000	1.507.500.000
6. Dividen Saham	39.385.753.550	110.424.474.461
7. Dividen Reksadana	32.790.546.977	22.560.221.723
8. Imbal Hasil Reksadana	68.360.247.887	67.679.771.365
9. Pendapatan Investasi Lainnya	1.333.137.275	143.835
10. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi :		
- Laba (Rugi) Pelepasan Saham	67.645.131.410	142.125.275.636
- Laba (Rugi) Pelepasan Obligasi	731.927.631.654	63.901.097.168
- Laba (Rugi) Pelepasan Reksadana	1.797.646.924	41.583.506.446
- Laba (Rugi) Pelepasan Sukuk	10.451.470.636	-
- Laba (Rugi) Pelepasan RDPT	3.756.421.509	-
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>6.767.348.478.226</b>	<b>6.030.630.254.179</b>
Beban Investasi	(5.365.681.139)	(3.548.150.721)
<b>Hasil Investasi - Beban Investasi</b>	<b>6.761.982.797.087</b>	<b>6.027.082.103.458</b>

Sumber : Accounting Division

BOP Pengelolaan AIP Semester II Tahun 2021	6,7% x Rp6.761.982.797.087 =	453.052.847.405
BOP Pengelolaan AIP Semester I Tahun 2021	6,7% x Rp6.027.082.103.458 =	403.814.500.932

BOP Pengelolaan AIP PNS Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp453.052.847.405,- dan Rp403.814.500.932,-. Peningkatan realisasi BOP Pengelolaan AIP PNS Semester II Tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya realisasi *gain* pelepasan investasi karena memanfaatkan momentum pasar yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mulai membaik walaupun masih terimbas oleh Pandemi Covid-19 yang tergambar pada IHSG dan indeks obligasi.

Perhitungan BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan PT TASPEN (Persero) sampai dengan kondisi Semester II Tahun 2021 adalah sebanyak 1.658 orang yang tersebar pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama / Kantor Cabang seluruh Indonesia serta beberapa karyawan yang diperbantukan/dipekerjakan di anak perusahaan PT TASPEN (Persero). Jika dibandingkan dengan jumlah karyawan pada Semester I Tahun 2021 sebanyak 1.748 orang, maka pada kondisi 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebanyak 90 orang dikarenakan penerimaan karyawan baru sebanyak 5 orang dan karyawan yang mengalami PMK (Pensiun, Meninggal, Keluar) sebanyak 95 orang.

Data karyawan PT TASPEN (Persero) dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 11  
Data Karyawan PT TASPEN (Persero)  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah SDM	
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kantor Pusat	428	429
2	Diperbantukan/Dipekerjakan	11	14
3	Kantor Cabang	1.219	1.305
<b>JUMLAH</b>		<b>1.658</b>	<b>1.748</b>

Sumber : Human Capital Division

Tabel 12  
Jumlah Karyawan Diperbantukan/Dipekerjakan  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

No	UNIT KERJA	Jumlah SDM	
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TASPEN Properti	0	0
2	TASPEN Life	3	4
3	DP Taspen	4	4
4	Bank MANTAP	3	2
5	TSP Abadi Sentosa	0	0
6	PT RSP	1	1
7	Lainnya	0	3
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>14</b>

Sumber : Human Capital Division

## B. ASPEK KEUANGAN

### 1. Dana Bersih

Dana Bersih akumulasi iuran pensiun pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp189.836.925.320.992,- mencapai 102,82% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp13.218.428.098.814,- atau naik 7,48%. Rincian Dana Bersih Akumulasi iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 13  
Dana Bersih Akumulasi iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
<b>1. ASET</b>					
<b>INVESTASI</b>					
Deposito	18.089.980.526.840	33.307.100.000.000	34.121.500.000.000	184,12	(2,39)
Obligasi :					
- Surat Utang Negara	70.592.872.964.187	82.259.363.927.530	81.664.393.537.224	116,53	0,73
- Obligasi Korporasi	30.234.951.935.437	17.926.389.870.080	17.942.052.492.990	59,29	(0,09)
Sukuk					
- Sukuk Pemerintah	24.341.141.446.052	30.704.929.291.285	26.306.083.020.619	126,14	16,72
- Sukuk Korporasi	3.283.831.887.457	105.702.473.250	106.319.907.750	3,22	(0,58)
Medium Term Notes	631.771.929.630	-	30.171.714.600	-	(100,00)
Reksadana	14.886.027.191.087	7.403.164.296.669	6.504.421.900.818	49,73	13,82
Saham	9.490.244.031.973	6.224.486.884.750	5.230.868.204.100	65,59	19,00
Penyertaan Langsung	2.887.659.000.000	2.227.091.226.025	2.022.847.231.160	77,12	10,10
Tanah dan Bangunan	-	48.407.000.000	48.093.000.000	-	0,65
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>174.438.480.912.663</b>	<b>180.206.634.969.589</b>	<b>173.976.751.009.261</b>	<b>103,31</b>	<b>3,58</b>
<b>ASET BUKAN INVESTASI</b>					
Kas dan Bank :					
- Kas	3.093.992	693.660	938.760	22,42	(26,11)
- Bank	2.359.018.163	2.414.482.223	1.808.519.850	102,35	33,51
Piutang Iuran	44.062.394.550	29.811.854.266	64.634.029.674	67,66	(53,88)
Piutang Hasil Investasi	1.950.180.087.763	2.055.443.957.265	2.139.725.237.452	105,40	(3,94)
Piutang Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-
Piutang Nilai Investasi	86.236.178.703	-	-	-	-
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN	8.116.213.786.706	7.565.311.324.300	-	93,21	-
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub	52.240.968.132	40.319.777.315	-	77,18	-
Piutang Lain-lain	61.839.986.263	96.390.244.072	22.128.962.284	155,87	335,58
Aset Lancar Lainnya	-	-	1.697.237.500	-	(100,00)
Tanah	-	-	513.077.996.800	-	(100,00)
Bangunan	-	-	214.069.913.682	-	(100,00)
Kendaraan	132.900.000	132.900.000	132.900.000	100,00	-
Komputer	4.432.131.954	2.599.562.890	3.392.134.395	58,65	(23,36)
Inventaris Kantor	10.814.739.242	8.345.215.454	9.005.707.564	77,17	(7,33)
Aset Operasional Lain :	-	-	-	-	-
- Aset Tetap Tidak Digunakan	361.613.523	181.679.736	306.270.823	50,24	(40,68)
- Aset Tidak Lancar Dimiliki Untuk Dijual	-	23.262.700	55.342.700	-	(57,97)
- Aset Tidak Berwujud	10.009.537.225	10.009.537.225	10.009.537.225	100,00	-
- Hak Guna Bangunan	30.388.630.149	27.594.863.465	30.559.630.149	90,81	(9,70)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(27.395.105.124)	(34.514.695.663)	(145.385.416.469)	125,99	76,26
<b>Jumlah Aset Bukan Investasi</b>	<b>10.341.879.961.242</b>	<b>9.804.064.658.908</b>	<b>2.865.218.942.389</b>	<b>94,80</b>	<b>242,18</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>184.780.360.873.904</b>	<b>190.010.699.628.497</b>	<b>176.841.969.951.650</b>	<b>102,83</b>	<b>7,48</b>
<b>2. KEWAJIBAN</b>					
Utang Iuran	356.882.427	997.608.712	339.826.855	279,53	193,56
Utang Klaim	-	290.273.600	173.035.721	-	67,75
Utang Perolehan Investasi	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	251.040.267	104.002.062	-	141,38
Utang Rengagaan barang dan jasa	-	75.350.000	-	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	-	89.089.748.065	89.089.748.065	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.913.173.283	-	3.658.350.815	-	(100,00)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	663.274.650	-	-	-
Utang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN	-	-	25.174.623	-	(100,00)
Utang Kepada Program THT	137.700.252.767	82.037.141.645	129.709.332.254	59,58	(36,75)
Utang Kepada Program THT-SI	-	-	3.389.311	-	(100,00)
Utang Lain-lain	-	369.870.566	369.869.766	-	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>143.970.308.477</b>	<b>173.774.307.505</b>	<b>223.472.729.472</b>	<b>120,70</b>	<b>(22,24)</b>
<b>Total Dana Bersih</b>	<b>184.636.390.565.427</b>	<b>189.836.925.320.992</b>	<b>176.618.497.222.178</b>	<b>102,82</b>	<b>7,48</b>

Sumber: Accounting Division

**a. Aset Investasi**

Investasi ditempatkan pada portofolio yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Penempatan investasi tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Semester II Tahun 2021 posisi nilai investasi sebesar Rp180.206.634.969.589,- mencapai 103,31% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp6.229.883.960.328,- atau naik sebesar 3,58%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pembelian instrumen keuangan dengan memanfaatkan momentum pasar terutama pada nilai instrumen investasi Surat Utang Negara, Sukuk Pemerintah, Saham dan Reksadana.

Penempatan dana pada Deposito pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp33.307.100.000.000,-, mencapai 184,12% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 menurun Rp814.400.000.000,- atau turun 2,39%. Penurunan didorong adanya proses switching ke instrumen lainnya dalam rangka memanfaatkan kondisi pasar saham dan obligasi yang perlahan semakin kondusif.

Tabel 14  
Nilai Deposito  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

NO	KETERANGAN	TINGKAT BUNGA	Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BANK RAKYAT INDONESIA	2,50%-7,30%	7.258.500.000.000	7.370.500.000.000
2	BANK TABUNGAN NEGARA	2,85%-6,50%	14.700.400.000.000	13.719.000.000.000
3	BANK NEGARA INDONESIA	4,25%-7,30%	779.500.000.000	779.500.000.000
4	BANK MANDIRI		-	-
5	BANK PEMBANGUNAN DAERAH :			
1	BPD JAWA TENGAH	3,50%-7,00%	2.308.500.000.000	4.047.500.000.000
2	BPD SULUTGO	5,75%-8,50%	425.000.000.000	425.000.000.000
3	BPD NTT	7,50%-8,00%	23.000.000.000	246.000.000.000
4	BPD DKI	5,75%	-	249.000.000.000
5	BPD SULSELBAR	4,25%	376.000.000.000	200.000.000.000
6	BPD RIAU KEPRI	5,00%	133.000.000.000	121.500.000.000
7	BPD KALIMANTAN TENGAH	6,00%	11.000.000.000	451.000.000.000
8	BPD NTB SYARIAH	5,00%	660.000.000.000	644.000.000.000
9	BPD BENGKULU	7,25%	136.200.000.000	262.500.000.000
10	BPD LAMPUNG	4,00%	412.000.000.000	245.500.000.000
11	BPD JAMBI	8,00%	-	300.000.000.000
12	BPD KALIMANTAN SELATAN	8,00%	-	8.000.000.000
13	BPD SULAWESI TENGGARA	7,25%-8,25%	-	384.000.000.000
14	BPD SUMATERA BARAT	8,50%	200.000.000.000	200.000.000.000
15	BPD JAWA BARAT	3,75%-7,0%	4.807.500.000.000	4.075.000.000.000
16	BPD BALI	6,15%-8,00%	1.076.500.000.000	373.000.000.000
17	BPD SULAWESI TENGAH	7,50%	-	20.500.000.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>33.307.100.000.000</b>	<b>34.121.500.000.000</b>

Sumber: Accounting Division

Penempatan dana pada Surat Utang Negara pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp82.259.363.927.530,- mencapai 116,53% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar Rp594.970.390.306,- atau naik 0,73%. Peningkatan disebabkan adanya penambahan pembelian SBN selama Semester II diantaranya FR0091 nilai nominal sebesar Rp930.700.000.000,- dengan rate 6,38% dan FR0092 nilai nominal sebesar Rp1.549.336.000.000.000,- dengan rate 7,13%. Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada obligasi diperkenankan hanya atas Obligasi dengan rating minimal A-.

Tabel 15  
Nilai Surat Utang Negara  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN BELI	TANGGAL JATUH TEMPO	RATE KUPON	Semester II		Semester I	
					NOMINAL	NILAI PASAR	NOMINAL	NILAI PASAR
1	FR0042	2009	15/07/2027	10,25	20.000.000.000	24.459.619.200	60.000.000.000	73.214.265.000
2	FR0044	2009	15/09/2024	10,00	497.000.000	568.066.134	497.000.000	569.041.393
3	FR0045	2011	15/05/2037	9,75	-	-	40.700.000.000	50.460.425.730
4	FR0047	2008	15/02/2028	10,00	378.409.000.000	461.270.263.139	378.409.000.000	459.827.211.770
5	FR0050	2008	15/07/2038	10,50	3.769.651.000.000	4.998.557.226.000	3.594.651.000.000	4.714.726.278.345
6	FR0052	2009	15/08/2030	10,50	2.561.461.000.000	3.265.096.744.473	2.561.461.000.000	3.240.100.880.993
7	FR0054	2011	15/07/2031	9,50	2.406.652.000.000	2.918.462.527.247	1.784.440.000.000	2.151.035.817.554
8	FR0056	2010	15/09/2026	8,38	-	-	500.000.000.000	563.750.000.000
9	FR0057	2011	15/05/2041	9,50	3.313.580.000.000	4.140.846.494.059	3.284.911.000.000	4.027.995.447.582
10	FR0058	2012	12/06/2032	8,25	1.550.000.000.000	1.739.874.752.000	2.453.183.000.000	2.727.772.826.747
11	FR0059	2012	15/05/2027	7,00	-	-	1.855.841.000.000	1.969.511.261.250
12	FR0061	2012	15/05/2022	7,00	-	-	-	-
12	FR0062	2012	15/10/2042	6,38	2.137.525.000.000	2.100.118.312.500	2.137.525.000.000	2.076.071.156.250
13	FR0064	2013	15/05/2028	6,13	-	-	936.644.000.000	939.374.748.116
14	FR0065	2012	15/05/2033	6,63	4.389.769.000.000	4.429.386.665.225	4.389.769.000.000	4.374.607.835.316
15	FR0067	2013	15/02/2044	8,75	7.631.414.000.000	8.942.999.711.571	6.883.798.000.000	7.928.525.726.352
16	FR0068	2013	15/03/2034	8,38	4.164.774.000.000	4.711.399.629.602	5.051.774.000.000	5.591.332.308.830
17	FR0071	2013	15/03/2029	9,00	2.370.000.000.000	2.745.052.500.000	2.126.798.000.000	2.464.958.882.000
18	FR0072	2015	15/05/2036	8,25	6.157.606.000.000	6.842.668.423.520	6.157.606.000.000	6.779.104.996.184
19	FR0073	2015	15/05/2031	8,75	3.816.486.000.000	4.426.406.222.467	4.934.486.000.000	5.680.746.674.068
20	FR0074	2017	15-08-2032	7,50	484.151.000.000	515.868.671.263	834.151.000.000	878.735.411.676
21	FR0075	2017	15/05/2038	7,50	2.777.378.000.000	2.901.486.441.298	2.762.378.000.000	2.832.844.826.343
22	FR0076	2017	15/05/2048	7,38	6.949.004.000.000	7.183.789.720.188	5.849.004.000.000	5.935.955.293.464
23	FR0078	2019	15/05/2029	8,25	-	-	20.000.000.000	22.350.000.000
24	FR0079	2019	15/04/2039	8,38	2.235.714.000.000	2.525.699.296.513	1.825.714.000.000	2.025.522.550.102
25	FR0080	2019	15/06/2035	7,50	2.439.612.000.000	2.567.846.106.232	2.709.612.000.000	2.801.061.405.000
26	FR0082	2019	15/09/2030	7,00	1.011.511.000.000	1.051.215.780.592	1.031.511.000.000	1.064.412.889.750
27	FR0083	2019	15/04/2030	7,50	9.220.299.000.000	9.646.541.251.975	8.651.299.000.000	8.876.232.774.000
28	FR0088	2021	15/06/2036	6,25	156.953.000.000	157.345.382.500	-	-
29	FR0089	2021	15/08/2051	6,88	1.417.377.000.000	1.434.096.379.092	1.417.377.000.000	1.413.592.603.410
30	FR0091	2021	15/04/2032	6,38	930.700.000.000	938.452.731.000	-	-
31	FR0092	2021	15/06/2042	7,13	1.549.336.000.000	1.589.855.009.740	-	-
JUMLAH					73.839.859.000.000	82.259.363.927.530	74.233.539.000.000	81.664.393.537.224

Sumber : Accounting Division

Penempatan dana pada Sukuk Pemerintah pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp30.704.929.291.285,- atau mencapai 126,14% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar Rp4.398.846.270.666,- atau naik 16,72% antara lain disebabkan adanya penambahan pembelian PBS028 sebesar Rp1.172.561.409.052,- PBS004 sebesar Rp737.567.926.504,- dan pembelian baru PBS025 sebesar Rp1.021.870.008.000,- selama periode Juli sampai dengan Desember 2021, serta peningkatan nilai pasar.



Tabel 16  
Nilai Sukuk Pemerintah  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

NO.	URAIAN	TAHUN BELI	TANGGAL JATUH TEMPO	RATE KUPON	Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021	
					NOMINAL	NILAI PASAR	NOMINAL	NILAI PASAR
1	IFR0006	2010	15/12/2030	10,25	50.000.000.000	63.055.301.500	50.000.000.000	63.353.250.500
2	IFR0007	2010	15/01/2025	10,25	629.307.000.000	730.550.042.314	629.307.000.000	734.738.741.172
3	IFR0010	2011	15/02/2036	10,00	1.152.306.000.000	1.445.154.694.638	1.152.306.000.000	1.458.034.848.460
4	PBS003	2012	15/01/2027	6,00	1.818.182.000.000	1.865.780.732.033	1.818.182.000.000	1.845.927.439.138
5	PBS004	2012	15/02/2037	6,10	3.623.872.000.000	3.530.556.607.464	2.931.240.000.000	2.792.988.680.960
6	PBS005	2013	15/04/2043	6,75	2.079.250.000.000	2.082.897.856.993	2.079.250.000.000	2.059.883.158.555
7	PBS007	2015	15/09/2040	9,00	2.179.994.000.000	2.588.078.957.827	2.179.994.000.000	2.554.748.266.563
8	PBS011	2016	15/08/2023	8,75	57.556.000.000	62.002.105.457	57.556.000.000	62.325.711.189
9	PBS012	2016	15/11/2031	8,88	9.015.632.000.000	10.640.344.812.725	8.828.632.000.000	10.236.736.385.572
10	PBS015	2018	15/07/2047	8,00	700.450.000.000	769.630.679.723	700.450.000.000	749.325.867.015
11	PBS019	2018	15/09/2023	8,25	-	-	135.670.000.000	145.643.879.089
12	PBS021	2019	15/11/2026	8,50	75.000.000.000	85.606.402.500	75.000.000.000	84.814.062.000
13	PBS022	2019	15/04/2034	8,63	56.654.000.000	64.726.648.855	56.654.000.000	64.275.355.555
14	PBS025	2021	15/05/2033	8,38	900.000.000.000	1.021.870.008.000	-	-
15	PBS028	2020	15/10/2046	7,75	3.474.205.000.000	3.862.079.907.345	2.534.776.000.000	2.689.518.498.293
16	PBS029	2021	15/03/2034	6,38	1.884.399.000.000	1.892.594.533.911	778.250.000.000	763.768.876.558
JUMLAH					27.696.807.000.000	30.704.929.291.285	24.007.267.000.000	26.306.083.020.619

Sumber : Accounting Division

Penempatan dana pada sukuk korporasi sebesar Rp105.702.473.250,- mencapai 3,22% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp617.434.500,- atau turun 0,58%. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan nilai wajar sukuk Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1.301.600.000,-.

Tabel 17  
Nilai Sukuk Korporasi  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

NO.	URAIAN	TAHUN BELI	TANGGAL JATUH TEMPO	RATE KUPON	Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021	
					NOMINAL	NILAI PASAR	NOMINAL	NILAI PASAR
1	KORPORASI SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	2019	21/03/2022	8,50	80.000.000.000	80.903.868.000	80.000.000.000	82.205.468.000
2	WIJAYA KARYA	2021	03/03/2028	9,75	25.000.000.000	24.798.605.250	25.000.000.000	24.114.439.750
JUMLAH					25.000.000.000	105.702.473.250	105.000.000.000	106.319.907.750

Sumber : Accounting Division

Penempatan dana pada reksadana Semester II Tahun 2021 sebesar Rp7.403.164.296.669,- mencapai 49,73% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp898.742.395.851,- atau naik 13,82%. Peningkatan signifikan disebabkan adanya penambahan pembelian Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sam Jalan Tol yang memiliki *underlying* 20% saham PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) sebesar Rp158.649.144.101,- Reksadana Saham HPAM Smart Beta Ekuitas sebesar Rp456.032.953.186,- Reksadana Bahana ETF Bisnis 27 sebesar Rp98.309.660.000,- dan Reksadana Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund sebesar Rp146.648.511.570,-.

Beberapa pertimbangan pembelian diantaranya adalah jalan tol ruas Semarang-Batang telah beroperasi sejak 21 Desember 2018 sehingga tidak ada risiko konstruksi dan JSB mampu membukukan laba positif sehingga diproyeksikan dapat membagikan dividen mulai tahun 2026. Selain itu, investasi pada produk RDPT merupakan salah satu strategi *switching* portofolio.

Tabel 18  
Nilai Reksadana  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

Uraian	Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
<b>Reksadana Saham</b>				
- Danareksa Mawar Konsumer 10	100.000.000.000	85.069.546.465	100.000.000.000	80.786.443.820
- Dana Ekuitas Andalan	-	-	-	-
- Bahana Dana Ekuitas Andalan Kelas G	100.000.000.000	90.740.298.119	100.000.000.000	83.995.851.496
- Samuel Indonesia Equity Fund	300.000.000.000	212.454.661.094	300.000.000.000	197.831.943.412
- Schroder Dana Prestasi Plus	-	-	-	-
- Syailendra Equity BUMN Plus	200.000.000.000	188.673.320.502	200.000.000.000	185.426.895.221
- Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	200.000.000.000	165.679.237.955	200.000.000.000	158.075.547.092
- Syailendra Equity Opportunity Fund	100.000.000.000	94.256.650.059	100.000.000.000	94.347.480.139
- Sinarmas Saham Unggulan	200.000.000.000	145.934.195.229	200.000.000.000	135.733.891.220
- Tram Consumption Plus	200.000.000.000	185.624.850.572	200.000.000.000	175.999.044.986
- HPAM Smart Beta Ekuitas	1.050.000.000.000	1.069.466.400.270	650.000.000.000	613.433.447.084
<b>Jumlah</b>	<b>2.450.000.000.000</b>	<b>2.237.899.160.265</b>	<b>2.050.000.000.000</b>	<b>1.725.630.544.470</b>
<b>Reksadana Pendapatan Tetap</b>				
- Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1	450.000.000.000	454.042.667.956	450.000.000.000	456.980.507.403
- Kehati Lestari Kelas S	300.000.000.000	298.380.000.000	300.000.000.000	294.825.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>750.000.000.000</b>	<b>752.422.667.956</b>	<b>750.000.000.000</b>	<b>751.805.507.403</b>
<b>Reksadana ETF</b>				
- Premier ETF IDX30	209.947.227.342	184.676.905.000	209.947.227.342	165.892.160.000
- Bahana ETF Bisnis 27	99.417.735.385	98.309.660.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>309.364.962.727</b>	<b>282.986.565.000</b>	<b>209.947.227.342</b>	<b>165.892.160.000</b>
<b>Reksadana Index</b>				
- Insight Sri-Kehati Likuid	150.000.000.000	145.653.035.376	150.000.000.000	128.243.636.656
- Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fu	150.000.000.000	146.648.511.570	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>292.301.546.946</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>128.243.636.656</b>
<b>Reksadana Campuran</b>				
- Manulife Dana Campuran II	100.000.000.000	98.743.802.938	100.000.000.000	95.923.882.003
<b>Jumlah</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>98.743.802.938</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>95.923.882.003</b>
<b>Reksadana Penyertaan Terbatas</b>				
- RDPT Sam Jalan Tol	1.861.149.750.000	1.969.054.691.272	1.760.149.750.000	1.810.405.547.171
- RDPT Ekuitas Danareksa Toll Road -01	253.224.514.000	310.556.747.023	270.250.000.000	307.098.803.700
- RDPT Danareksa BUMN Fund 2019 - Properti 8	229.500.000.000	232.373.340.000	229.500.000.000	232.541.586.450
- RDPT Ekuitas Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	872.108.729.005	813.027.068.189	970.690.800.574	855.236.718.570
- RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas	510.480.091.750	413.798.707.080	702.689.848.750	431.643.514.395
<b>Jumlah</b>	<b>3.726.463.084.755</b>	<b>3.738.810.553.564</b>	<b>3.933.280.399.324</b>	<b>3.636.926.170.286</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>7.635.828.047.482</b>	<b>7.403.164.296.669</b>	<b>7.193.227.626.666</b>	<b>6.504.421.900.818</b>

Sumber : Accounting Division

Pada Semester II Tahun 2021 juga terjadi penurunan untuk penempatan dana pada beberapa instrumen investasi yaitu obligasi korporasi, MTN dan saham. Realisasi Obligasi Korporasi sebesar Rp17.926.389.870.080,- mencapai 59,29% dari RKA 2021 dan mengalami penurunan sebesar Rp15.662.622.910,- atau turun 0,09%. Hal ini disebabkan oleh adanya obligasi yang telah jatuh tempo pada periode Juli sampai dengan Desember 2021 yaitu :

1. PT Bank Tabungan Negara (Tahap II Tahun 2016 Seri B)
2. PT Bank Ekspor Indonesia (Tahap III Tahun 2016 Seri C dan Tahap II Tahun 2016 Seri C)
3. PT Pembangunan Perumahan (Tahap I Tahun 2018 Seri A)
4. PT Sarana Multigriya Financial (Tahap VI Tahun 2016 dan Tahap VI Seri B Tahun 2018)
5. PT Maybank Indonesia Finance (Tahap III Tahun 2016 Seri B)

Penempatan dana pada saham pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp6.224.486.884.750,-, mencapai 65,59% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode Semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp993.618.680.650,-

atau naik 19%. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan penambahan pembelian dengan mempertimbangkan momentum dan kondisi pasar yang mulai kondusif. Saham yang dimiliki saat ini diukur berdasarkan harga kuotasi pasar aktif yaitu didasarkan pada harga penutupan bursa setiap akhir bulan pada Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui fasilitas *Bloomberg*. IHSI pada 30 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 berada pada level 6.581,48 dan 5.985,49.

**b. Aset Bukan Investasi**

Realisasi Aset Bukan Investasi pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp9.804.064.658.908,- mencapai 94,80% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.938.845.716.519,- atau naik 94,80%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya piutang kepada Dana Belanja Pensiun APBN sebesar Rp7.565.311.324.300,- dalam rangka pemenuhan pendanaan untuk pembayaran pensiun bulan Januari 2022 karena *dropping* dana dari pemerintah baru dapat dilakukan pada bulan Januari 2022 sesuai dengan sumber pembiayaannya yang berasal dari APBN tahun berikutnya. Penggunaan dana tersebut dilunasi pada saat pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 3 Januari 2022.

Namun pada sisi lain terjadi peningkatan pada Piutang Lain-lain, yang realisasinya pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp96.390.244.072,- mencapai 155,87% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp74.261.281.788,- atau naik 335,58%.

Saldo Piutang Hasil Investasi pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp2.055.443.957.265,- mencapai 105,40% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode Semester I Tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar Rp84.281.280.187,- atau naik 10,88%. Peningkatan ini disebabkan oleh hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya baru akan diterima setelah tanggal 31 Desember 2021.

Menindaklanjuti PMK 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang telah diperbaharui dengan PMK 52/PMK.02/2021 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Aset Bukan Investasi berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di 42 Kantor Cabang, telah dipindahbukukan ke Program Tabungan Hari Tua berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor: S-206/MK.02/2021 tanggal 17 Maret 2021.

Pelaksanaan pemindahbukuan aset milik AIP berupa tanah dan bangunan menjadi aset program THT telah dilakukan pada bulan Juli 2021 dan penyelesaian pembayaran telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021.

**c. Kewajiban**

Kewajiban yang timbul pada periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp173.774.307.505,-, mencapai 120,70% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode Semester I Tahun 2021, mengalami penurunan sebesar Rp49.698.421.967,- atau turun 22,24%. Penurunan yang paling signifikan diantaranya adalah Utang

kepada program THT yaitu turun sebesar Rp47.672.190.609,- karena adanya penyelesaian kewajiban pada Semester II.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga periode Semester II Tahun 2021 masih sama dengan periode Semester I Tahun 2021, yaitu sebesar Rp89.089.748.065,-, yang merupakan utang kepada pihak ketiga terkait kepemilikan Jembatan Merah Plaza (JMP) atas estimasi biaya Hak Guna Bangunan (HGB) dan biaya *service charge*.

Kewajiban tersebut dicatat berdasarkan surat dari Perhimpunan Penghuni JMP Nomor 010/HPP/VI/12 tanggal 18 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Biaya Perpanjangan HGB per m2 dari stan/kios sebesar Rp27.594.863.465,- (belum termasuk denda). Sedangkan untuk biaya *service charge* dari Juni 2005 sampai dengan Desember 2020 yang masih harus dibayar PT TASPEN (Persero) adalah Rp61.494.884.600,-.

Pada tanggal 26 Februari 2019, PT TASPEN (Persero) telah menerima surat somasi III (terakhir) nomor 05/K.Som.2/II/2019 dari Samba, Indra & Partners (Law Firm) selaku penerima kuasa dari PT Lamicitra Nusantara dan PT Jasamitra Propertindo terkait kewajiban biaya perpanjangan dan biaya *service charge* atas stand/kios milik PT TASPEN (Persero) di Jembatan Merah Plaza. PT TASPEN (Persero) dengan nomor SRT-26/L/032019 tanggal 8 Maret 2019 menjawab surat somasi tersebut dengan menyampaikan :

- Properti Investasi di Jembatan Merah Plaza merupakan milik AIP yang berasal dari APBN
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018 tentang perubahan atas PMK 139/PMK.02/2017 pasal 32 ayat (1) “Badan Penyelenggara harus menyelesaikan penempatan aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung dan investasi bangunan atau tanah dengan bangunan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara sebelum tahun 2015” dan pasal 32 ayat (3) “Segala biaya yang timbul terkait dengan penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membayar kewajiban yang melekat pada aset tersebut dapat mempergunakan hasil penyelesaian aset dimaksud”.

## **2. Penambahan Dana**

Realisasi penambahan dana selama Periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp14.078.486.144.553,-, mencapai 59,30% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar Rp8.116.316.804.059,- atau naik 136,13%. Secara ringkas realisasi penambahan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19  
Jumlah Penambahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021 (5=3/2)	% Naik/ Turun (6=3/4)
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
1	2	3	4	(5=3/2)	(6=3/4)
1. Hasil Investasi	12.670.715.460.862	6.767.348.478.226	6.030.630.254.179	53,41	12,22
2. Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi	827.365.411.706	2.265.252.045.899	(4.489.753.775.072)	(273,79)	(150,45)
3. Peningkatan/Penurunan Aset Tetap	-	693.396.775.700	888.347.643	-	77.954,66
4. Iuran Peserta	8.812.478.909.986	4.352.360.257.503	4.417.326.372.455	49,39	(1,47)
5. Pendapatan Diluar Investasi	1.429.302.796.789	128.587.225	3.078.141.289	0,01	(95,82)
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>23.739.862.579.342</b>	<b>14.078.486.144.553</b>	<b>5.962.169.340.494</b>	<b>59,30</b>	<b>136,13</b>

Sumber : Accounting Division

#### a. Hasil Investasi

Hasil investasi selama periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp6.767.348.478.226,-, mencapai 53,41% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp736.718.224.047,- atau naik 12,22%.

Kenaikan signifikan berasal dari kontribusi Laba (Rugi) Pelepasan investasi yang realisasinya pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp815.578.302.133,-, mencapai 55,27%, yang jika dibandingkan dengan periode Semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp567.968.422.883,- atau naik 229,38%. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan pelepasan investasi dengan memanfaatkan kondisi ekonomi yang perlahan semakin kondusif dan tetap mempertimbangkan momentum dan kondisi pasar saat ini yang masih terimbas oleh Pandemi Covid-19.

Realisasi Pendapatan Investasi Lainnya pada periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp1.333.137.275,-, jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.332.993.440,- atau naik 926.751,79% yang disebabkan oleh penerimaan bunga Deposito yang jatuh temponya pada hari libur.

Realisasi Dividen Reksadana periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp32.790.546.977,-, yang jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp10.230.325.254,- atau naik 45,35%. Hal ini disebabkan adanya penerimaan dividen reksadana pada periode Semester II Tahun 2021 antara lain Manulife Obligasi Unggulan Kelas II, Kehati Lestari Kelas S, Premier ETF IDX30, SAM Indonesia Equity Fund, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara dan Syailendra Equity BUMN Plus.

Realisasi Bunga Deposito periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp948.841.850.735,- mencapai 71,13% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, mengalami penurunan sebesar Rp25.638.367.299,- atau turun 2,63%. Penurunan ini disebabkan rate bunga yang berlaku saat ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penempatan dana pada Deposito merupakan penempatan sementara sambil menunggu *timing* untuk *switching* ke instrumen

lainnya yang masih dalam proses dengan mempertimbangkan kondisi pasar saham yang perlahan kondusif imbas Pandemi Covid-19.

Realisasi Bunga Obligasi Korporasi periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp717.909.638.885,-, mencapai 34,68% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, mengalami penurunan sebesar Rp64.241.027.790,- atau turun 8,21%. Hal ini disebabkan beberapa obligasi korporasi telah jatuh tempo pada periode Semester II Tahun 2021.

Disamping beberapa instrumen yang mengalami penurunan perolehan hasil investasi pada periode Semester II Tahun 2021, terdapat instrumen investasi yang mengalami peningkatan hasil investasi, diantaranya Obligasi Surat Utang Negara, Imbal Hasil Sukuk Pemerintah dan Korporasi, Dividen Penyertaan, serta Imbal Hasil Reksadana. Peningkatan yang paling signifikan berasal dari kontribusi Bunga Surat Utang Negara, yang realisasi pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp3.153.036.441.941,-, mencapai 58,60% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode Semester I Tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp226.175.054.976,- atau naik 7,73%. Hal ini disebabkan adanya penambahan pembelian pada periode Juli sampai dengan Desember 2021 diantaranya pembelian FR0091 dengan rate kupon 6,38% dan pembelian FR0092 dengan rate kupon 7,13%.

Hal yang sama juga terjadi pada Sukuk Pemerintah dan Sukuk korporasi yang mengalami peningkatan akibat adanya pembelian PBS028 dan PBS025. Adapun realisasi imbal hasil Sukuk Pemerintah pada periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp984.421.807.644,- mencapai 54,90% jika dibandingkan dengan periode Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp93.463.453.865,- atau naik 10,49%.

**b. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi**

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi merupakan selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat Investasi pada periode laporan. Selama Periode Semester II Tahun 2021, nilai wajar investasi mengalami peningkatan sebesar Rp2.265.252.045.899,- mencapai 273,79% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp6.755.005.820.971,- atau naik 150,45%.

Kenaikan ini disebabkan kondisi pasar modal yang mulai membaik dan semakin kondusif dari imbas pandemi Covid-19, sehingga nilai wajar untuk instrumen investasi Obligasi, Sukuk, MTN, Reksadana dan Saham mengalami peningkatan.

**c. Peningkatan (Penurunan) Aset Tetap**

Penurunan Aset Tetap pada periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp693.396.775.700,- merupakan dampak telah dilakukannya pemindahbukuan Aset Tetap Berupa Tanah dan Bangunan dari Akumulasi Iuran Pensiun ke Program Tabungan Hari Tua pada bulan Juli 2021.

**d. Iuran Peserta**

Realisasi pendapatan iuran peserta pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp4.352.360.257.503,- mencapai 49,39% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp64.966.114.952,-. Hal ini disebabkan turunnya jumlah peserta aktif 83.449 orang menjadi 3.914.322 orang

peserta sampai dengan Semester II Tahun 2021. Terjadinya penurunan jumlah peserta karena kejadian Pensiun, Meninggal dan Keluar yang berdampak pada penurunan pendapatan iuran, sedangkan penambahan peserta baru yang ditargetkan sebanyak 150.315 orang selama tahun 2021, baru terealisasi sebanyak 9.968 orang atau 6,63% dari target RKAP.

**e. Pendapatan Diluar Investasi**

Pendapatan Diluar Investasi yang termasuk diantaranya pendapatan sewa gedung dan ruang, pendapatan jasa giro dan laba penjualan aset, pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp128.587.225,- mencapai 0,01% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.949.554.064,- atau turun 95,82%. Penurunan ini sebagai dampak atas pemindahbukuan Aset Tanah dan Bangunan milik AIP ke Program THT pada bulan Juli 2021 sehingga pada Semester II Tahun 2021 tidak ada penerimaan atas sewa gedung dan ruang.

**3. Pengurangan Dana**

Total Pengurangan Dana Akumulasi iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara selama periode Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp866.730.585.739,- mencapai 50,28% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp77.315.431.896,- atau naik 9,79%.

Sebagai gambaran secara ringkas pengurangan Dana Akumulasi iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 20  
Pengurangan Dana Akumulasi iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
1 Beban Investasi	8.239.562.219	5.365.681.139	3.548.150.721	65,12	51,22
2 Beban Operasional					
a. Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	711.519.600.000	352.701.841.025	329.655.236.255	49,57	6,99
- Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS	848.385.885.209	453.052.847.405	403.814.500.932	53,40	12,19
b. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.506.017.657	1.381.162.345	959.150.992	91,71	44,00
3 Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	154.214.852.326	54.229.053.825	51.438.114.943	35,16	5,43
4 Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-
Jumlah Pengurangan	1.723.865.917.411	866.730.585.739	789.415.153.843	50,28	9,79

Sumber : Accounting Division

**Tabel 21**  
**Perubahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021**

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
<b>1. PENAMBAHAN</b>					
Hasil Investasi					
- Bunga Deposito	1.333.865.862.314	948.841.850.735	974.480.218.034	71,13	(2,63)
- Bunga Obligasi					
- Surat Utang Negara	5.380.251.727.200	3.153.036.441.941	2.926.861.386.966	58,60	7,73
- Obligasi Korporasi	2.070.214.178.316	717.909.638.885	782.150.666.674	34,68	(8,21)
Imbal Hasil Sukuk					
- Sukuk Pemerintah	1.792.997.385.000	984.421.807.644	890.958.353.779	54,90	10,49
- Sukuk Korporasi	156.758.333.333	4.618.751.199	4.192.188.092	2,95	10,18
- Dividen Penyertaan	-	-	2.205.450.000	-	(100,00)
- Bunga Medium Term Notes	38.048.250.000	1.072.000.000	1.507.500.000	2,82	(28,89)
- Dividen Saham	185.807.028.699	39.385.753.550	110.424.474.461	21,20	(64,33)
- Dividen Reksadana	-	32.790.546.977	22.560.221.723	-	45,35
- Imbal Hasil Reksadana	237.072.696.000	68.360.247.887	67.679.771.365	28,84	1,01
- Pendapatan Investasi Lainnya	-	1.333.137.275	143.835	-	926.751,79
- Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.475.700.000.000	815.578.302.133	247.609.879.250	55,27	229,38
<b>Sub Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>12.670.715.460.862</b>	<b>6.767.348.478.226</b>	<b>6.030.630.254.179</b>	<b>53,41</b>	<b>12,22</b>
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi					
- Obligasi	200.808.780.896	535.901.550.543	(2.685.639.878.249)	266,87	119,95
- Sukuk	14.632.991.000	543.868.304.405	(521.924.489.163)	3.716,73	204,20
- Medium Term Notes	643.053.739	(171.714.600)	(80.261.400)	(26,70)	(113,94)
- Reksadana	66.810.585.850	171.545.898.579	(151.873.394.225)	256,76	212,95
- Saham	544.470.000.222	809.550.012.107	(1.130.235.752.035)	148,69	171,63
- Properti Investasi	-	314.000.000	-	-	-
- Penempatan Langsung	-	204.243.994.865	-	-	-
<b>Sub Jumlah Peningkatan (Penurunan)</b>	<b>827.365.411.706</b>	<b>2.265.252.045.899</b>	<b>(4.489.753.775.072)</b>	<b>273,79</b>	<b>150,45</b>
Peningkatan/Penurunan Aset Tetap	-	693.396.775.700	888.347.643	-	77.954,66
Iuran Peserta	8.812.478.909.986	4.352.360.257.503	4.417.326.372.455	49,39	(1,47)
Pendapatan Diluar Investasi	1.429.302.796.789	128.587.225	3.078.141.289	0,01	(95,82)
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>23.739.862.579.342</b>	<b>14.078.486.144.553</b>	<b>5.962.169.340.494</b>	<b>59,30</b>	<b>136,13</b>
<b>2. PENGURANGAN</b>					
- Beban Investasi	8.239.562.219	5.365.681.139	3.548.150.721	65,12	51,22
- Beban Operasional					
- Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	711.519.600.000	352.701.841.025	329.655.236.255	49,57	6,99
- Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS	848.385.885.209	453.052.847.405	403.814.500.932	53,40	12,19
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.506.017.657	1.381.162.345	959.150.992	91,71	44,00
- Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	154.214.852.326	54.229.053.825	51.438.114.943	35,16	5,43
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>1.723.865.917.411</b>	<b>866.730.585.739</b>	<b>789.415.153.843</b>	<b>50,28</b>	<b>9,79</b>
<b>3. PENINGKATAN/PENURUNAN DANA</b>					
Dana Bersih Awal Periode	22.015.996.661.931	13.211.755.558.814	5.172.754.186.651	60,01	155,41
Dana Bersih Akhir Periode	162.620.393.903.496	176.618.497.222.178	171.445.743.035.527	108,61	3,02
Koreksi Dana Bersih	-	6.672.540.000	-	-	-
<b>Dana Bersih Akhir Periode</b>	<b>184.636.390.565.427</b>	<b>189.836.925.320.992</b>	<b>176.618.497.222.178</b>	<b>102,82</b>	<b>7,48</b>

Sumber : Accounting Division

#### 4. Dana Bersih Akhir Periode

Dana Bersih Semester II Tahun 2021 sebesar Rp189.836.925.320.992,- atau mencapai 102,82% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar Rp13.218.428.098.814,- atau naik 7,48%.



**a. Beban Investasi**

Realisasi beban investasi Semester II Tahun 2021 sebesar Rp5.365.681.139,- atau mencapai 65,12% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.817.530.418,- atau naik 51,22%. Kenaikan tersebut disebabkan pada Semester II Tahun 2021 adanya beban jasa penilaian investasi atas aset investasi yang dimiliki.

**b. Beban Operasional**

**1) Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)**

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun merupakan biaya yang dibebankan kepada Akumulasi Iuran Pensiun PNS atas penugasan Pemerintah kepada PT TASPEN (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun sesuai PMK 39/PMK.02/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero).

BOP atas Pengelolaan Dana AIP PNS dibayarkan dalam rangka pengelolaan Dana AIP berdasarkan PMK 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.02/2018 pada tanggal 21 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Mendasari peraturan tersebut, beban operasional penyelenggaraan terdiri dari;

**a) BOP Pembayaran Manfaat Pensiun**

Penggantian BOP Pembayaran Manfaat Pensiun PNS Semester II 2021 sebesar Rp352.701.841.025,- mencapai 49,57% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp23.046.604.770,- atau naik 6,99%. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 513/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) Tahun 2021 ditetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp691.275.368.730,- dengan biaya satuan Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp19.984,- per penerima manfaat pensiun dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021.

**b) Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS**

BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS merupakan beban yang terjadi selama Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 berdasarkan rumus 6,7% dari hasil investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dikurangi dengan Beban Investasi. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Realisasi BOP pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS Semester II Tahun 2021 sebesar Rp453.052.847.405, mencapai 53,40% dari RKA 2021 yang jika

dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp49.238.346.473,- atau naik 12,19%. Peningkatan ini berbanding lurus dengan meningkatnya hasil investasi Semester II Tahun 2021.

## 2) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi Semester II Tahun 2021 sebesar Rp1.381.162.345,- mencapai 91,71% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp422.011.353,- atau naik 44%. Hal ini disebabkan adanya pengakuan amortisasi Hak Guna Bangunan properti investasi di Jembatan Merah Plaza.

## c. Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)

Realisasi pembayaran Manfaat Nilai Tunai (SP3IP) Semester II Tahun 2021 sebesar Rp54.229.053.825 mencapai 35,16% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.790.938.882,- atau naik 5,43%. Peningkatan ini berbanding terbalik dengan kejadian klaim yang turun sebanyak 23 kejadian menjadi 1.323 kejadian di Semester II Tahun 2021, hal ini disebabkan oleh pengajuan klaim untuk kejadian keluar sebelum mencapai usia pensiun yang berasal dari peserta dengan masa kerja yang lebih lama, sehingga manfaat nilai tunai yang dibayarkan lebih besar.

## C. ASPEK INVESTASI

### 1. Penempatan Investasi

Investasi Dana Akumulasi Iuran Pensiun ditempatkan pada portofolio yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Pengelolaan dana AIP dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang berlaku yaitu dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian (*prudent*), keamanan dana, dan hasil yang memadai. Dana yang ditempatkan pada berbagai jenis portofolio investasi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penempatan Investasi dapat diuraikan pada tabel berikut:

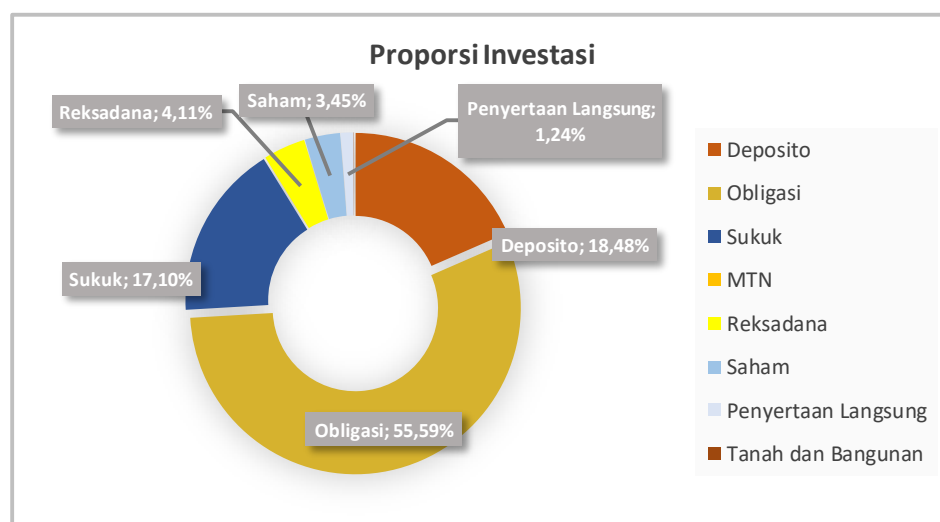
Tabel 22  
Penempatan Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021 (5=3/2)	% Naik/ Turun (6=3/4)
		Semester II Tahun 2021 3	Semester I Tahun 2021 4		
Deposito	18.089.980.526.840	33.307.100.000.000	34.121.500.000.000	184,12	(2,39)
Obligasi	100.827.824.899.624	100.185.753.797.610	99.606.446.030.214	99,36	0,58
Sukuk	27.624.973.333.509	30.810.631.764.535	26.412.402.928.369	111,53	16,65
MTN	631.771.929.630	-	30.171.714.600	-	(100,00)
Reksadana	14.886.027.191.087	7.403.164.296.669	6.504.421.900.818	49,73	13,82
Saham	9.490.244.031.973	6.224.486.884.750	5.230.868.204.100	65,59	19,00
Penyertaan Langsung	2.887.659.000.000	2.227.091.226.025	2.022.847.231.160	77,12	10,10
Tanah dan Bangunan	-	48.407.000.000	48.093.000.000	-	0,65
<b>Jumlah</b>	<b>174.438.480.912.663</b>	<b>180.206.634.969.589</b>	<b>173.976.751.009.261</b>	<b>103,31</b>	<b>3,58</b>

Sumber : Accounting Division

Jumlah Investasi pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp180.206.634.969.589,- mencapai 103,31% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp6.229.883.960.328,- atau naik 3,58%.

Grafik : 1  
Proporsi Penempatan Investasi  
Semester II Tahun 2021



## 2. Hasil Investasi

Secara ringkas hasil investasi Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut:

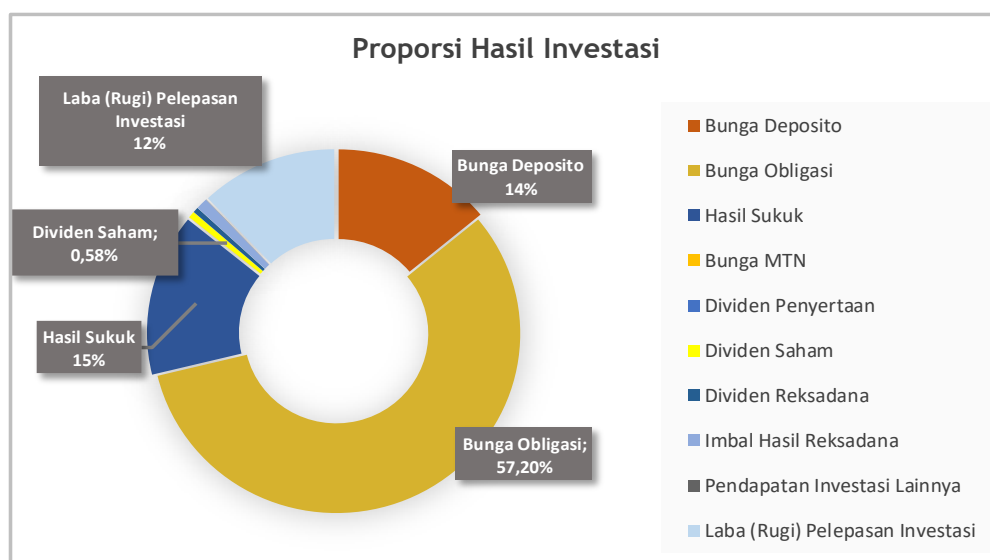
Tabel 23  
Hasil Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021 (5=3/2)	% Naik/ Turun (6)
		Semester II Tahun 2021 (3)	Semester I Tahun 2021 (4)		
1	2	(3)	(4)	(5=3/2)	(6)
Bunga Deposito	1.333.865.862.314	948.841.850.735	974.480.218.034	71,13	(2,63)
Bunga Obligasi	7.450.465.905.516	3.870.946.080.826	3.709.012.053.640	51,96	4,37
Hasil Sukuk	1.949.755.718.333	989.040.558.843	895.150.541.871	50,73	10,49
Bunga MTN	38.048.250.000	1.072.000.000	1.507.500.000	2,82	(28,89)
Dividen Penyertaan	-	-	2.205.450.000	0,00	(100,00)
Dividen Saham	185.807.028.699	39.385.753.550	110.424.474.461	21,20	(64,33)
Dividen Reksadana	-	32.790.546.977	22.560.221.723	0,00	45,35
Imbal Hasil Reksadana	237.072.696.000	68.360.247.887	67.679.771.365	28,84	1,01
Pendapatan Investasi Lainnya	-	1.333.137.275	143.835	0,00	926.751,79
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.475.700.000.000	815.578.302.133	247.609.879.250	55,27	229,38
<b>Jumlah</b>	<b>12.670.715.460.862</b>	<b>6.767.348.478.226</b>	<b>6.030.630.254.179</b>	<b>53,41</b>	<b>12,22</b>

Sumber : Accounting Division

Hasil investasi Semester II Tahun 2021 sebesar Rp6.767.348.478.226,- mencapai 53,41% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp736.718.224.047,- atau naik 12,22%.

Grafik : 2  
Proporsi Hasil Investasi  
Per Semester II Tahun 2021



### 3. Beban Investasi

Tabel 24  
Beban Investasi  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
Beban Investasi	8.239.562.219	5.365.681.139	3.548.150.721	65,12	51,22

Sumber : Accounting Division

Realisasi beban investasi semester II Tahun 2021 sebesar Rp5.365.681.139,- atau mencapai 65,12% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.817.530.418,- atau naik 51,22%. Kenaikan tersebut disebabkan pada Semester II Tahun 2021 adanya realisasi beban jasa penilaian investasi atas aset investasi yang dimiliki.

Tabel 25  
Rincian Beban Investasi  
Juli sampai dengan Desember 2021

No	Uraian	BEBAN KUSTODI						TOTAL
		Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	
1	<b>Beban Penyimpangan Surat Berharga</b>							
	- Surat Utang Negara	401.479.724	419.363.091	421.039.674	410.635.972	415.418.470	800.083.671	2.868.020.602
	- Obligasi Korporasi	92.147.183	95.079.041	91.865.589	92.688.017	94.659.895	185.166.551	651.606.276
	- Sukuk Pemerintah	129.839.302	135.572.954	143.844.099	139.474.383	146.480.163	296.920.263	992.131.164
	- Sukuk Korporasi	567.875	586.804	586.804	567.875	586.804	1.154.679	4.050.841
	- Medium Term Notes	162.250	167.658	167.658	162.250	167.658	-	827.474
	- Reksadana	29.604	30.325	30.325	29.778	30.768	64.996	215.796
	- Saham	12.242	12.651	12.706	12.917	12.556	25.317	88.389
	- RTGS	210.000	115.000	120.000	310.000	495.000	1.340.000	2.590.000
	<b>Sub Total</b>	-	650.927.524	657.666.855	643.881.192	657.851.314	1.284.755.477	4.519.530.542
2	Beban Jasa Penilaian Investasi	(119.255.267)	-	585.000.000	-	104.500.000	75.350.000	645.594.733
3	Beban PBB JMP Surabaya	-	194.438.260	-	-	-	-	194.438.260
4	Beban Asuransi JMP Surabaya	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Adm Bank	866.077	885.214	985.562	847.113	834.187	1.699.451	6.117.604
	<b>Sub Total</b>	(118.389.190)	195.323.474	585.985.562	847.113	105.334.187	77.049.451	846.150.597
	<b>Grand Total</b>	(118.389.190)	846.250.998	1.243.652.417	644.728.305	763.185.501	1.361.804.928	5.365.681.139

#### 4. Realisasi Tingkat Pengembalian Hasil Investasi (Yield on investment/YOI)

Perubahan metode perhitungan YOI, dari aritmatik menjadi geometrik, dengan mengadopsi *best practice* industri dana pensiun, sehingga perhitungan YOI berdasarkan Geometris sebagaimana PMK Nomor : 169/PMK.02/2019 disajikan sebagai berikut:

	JULI 2021	AGUSTUS 2021	SEPTEMBER 2021
NILAI INVESTASI	176.768.913.727.470	179.911.322.984.895	180.881.919.770.457
HASIL INVESTASI	7.021.448.772.737	8.010.027.705.501	8.989.955.273.676
YOI GEOMETRIS	4,09%	4,64%	5,18%
	OKTOBER 2021	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021
NILAI INVESTASI	183.482.020.899.894	186.421.927.767.246	180.206.634.969.589
HASIL INVESTASI	10.360.934.644.981	11.571.368.875.767	12.797.978.732.405
YOI GEOMETRIS	5,94%	6,59%	7,27%

Realisasi YOI geometris sampai dengan Desember 2021 sebesar 7,27%, kontribusi terbesar oleh optimalisasi hasil pada instrumen SBN dan deposito selama Semester II Tahun 2021 yang mampu memberikan hasil di atas targetnya masing-masing serta kinerja pasar modal yang perlahan bangkit akibat dampak pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi kondisi tersebut telah dilakukan *rebalancing* portofolio sehingga dampak penurunan kinerja pasar modal tidak berdampak besar pada kinerja Dana AIP secara keseluruhan. Rebalancing dilakukan melalui rencana penambahan penempatan dana pada instrumen yang memberikan *return variable* disesuaikan dan dialihkan ke instrumen yang memberikan hasil tetap dengan risiko yang cukup rendah. Hal tersebut

tercermin dari posisi nilai saham dan reksa dana masih di bawah targetnya, sedangkan posisi nilai deposito dan SUN berada di atas targetnya.

**5. Karakteristik dan Risiko tiap jenis Investasi**

Instrumen investasi yang diperkenankan dalam portofolio investasi Akumulasi Iuran Pensiun adalah sebagai berikut:

**a. Deposito**

Risiko atas penempatan aset investasi di Deposito berupa risiko kerugian, baik penurunan maupun kehilangan nilai investasi yang timbul akibat dari ketidakmampuan bank dalam melakukan pembayaran nilai pokok beserta bunga kepada deposan. Aspek dan indikator risiko penempatan Deposito sebagai berikut:

Aspek Risiko	Indikator
Risiko Likuiditas	Aset Likuid Primer & Likuid Sekunder/Pendanaan Jangka Pendek
	LFR (Loan to Funding Ratio)
Risiko Pasar	Total Derivatif/Total Aset
	Aset Keuangan Jatuh Tempo > 1 Tahun/Kewajiban Keuangan Jatuh Tempo > 1 Tahun
Risiko Kredit	Non Performance Loan (NPL)
	Aktiva Produktif Bermasala/Total Aktif Produktif
Faktor Profitabilitas	Net Interest Margin (NIM)
	Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Faktor Permodalan	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Faktor Kualitatif	Risiko Manajemen & Reputasi

**b. Surat Utang Negara (SUN)**

Risiko atas penempatan aset investasi pada SUN berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai atau hilangnya manfaat investasi yang timbul akibat faktor perubahan pasar maupun kondisi makroekonomi domestik. Aspek dan indikator risiko penempatan SUN sebagai berikut :

Risiko Suku Bunga	Durasi dan Konveksitas
Risiko Pasar	Outlook Ekonomi
Risiko Likuiditas	Rata-rata Transaksi (Miliar)
	Persentase Likuiditas
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito
	TTM (Year)
Risiko Inflasi	Rasio Kupon/Ekspektasi
	Inflasi Tahunan

**c. Obligasi Korporasi dan Sukuk**

Risiko atas penempatan aset investasi pada Obligasi Korporasi dan Sukuk berupa risiko kerugian, seperti penurunan atau hilangnya nilai serta manfaat investasi yang timbul akibat faktor perubahan pasar maupun kondisi fundamental penerbit obligasi. Aspek dan indikator risiko penempatan Obligasi Korporasi dan Sukuk sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
1. Obligasi Sektor Finance AFS	
Risiko Suku Bunga	Durasi dan Konveksitas
Risiko Pasar	Outlook Ekonomi
	Outlook Industri
Risiko Kredit	Rating
	Z-Score
	Penerbit
	Senioritas Obligasi
	DER
Risiko Likuiditas	Persentase Likuiditas Rata-rata Transaksi (Miliar)
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
2 Obligasi Sektor Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito TTM (Year)
Risiko Kredit	Rating
	Z-score
	Penerbit
	Senioritas Obligasi
	DER
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
Risiko Inflasi	Rasion Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan
3 Obligasi Sektor Non Finance AFS	
Risiko Suku Bunga	Durasi dan Konveksitas
Risiko Pasar	Outlook Ekonomi Outlook Industri
Risiko Kredit	Rating
	Z-Score
	Penerbit
	Senioritas Obligasi
	DER
	ICR
Risiko Likuiditas	Persentase Likuiditas Rata-rata Transaksi (Miliar)
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
4 Obligasi Sektor Non Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito TTM (Year)
Risiko Kredit	Rating
	Z-score
	Penerbit
	Senioritas Obligasi
	DER
	ICR
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
Risiko Infasi	Risiko Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan

d. Medium Terms Note (MTN)

Risiko atas penempatan aset investasi pada MTN berupa risiko kerugian, seperti penurunan atau hilangnya nilai serta manfaat investasi yang timbul akibat faktor perubahan pasar maupun kondisi fundamental penerbit MTN. Aspek dan indikator risiko penempatan MTN sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
1. MTN Non Finance	
Obligasi Sektor Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito
	TTM (Year)
Risiko Kredit	Rating
	Z-score
	Penerbit
	Senioritas Obligasi
	DER
	ICR
Risiko Spesifik	Reputasi
Risiko Inflasi	Rasion Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan
2. MTN Finance	
Obligasi Sektor Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito
	TTM (Year)
Risiko Kredit	Rating
	Z-score
	Penerbit
	Senioritas Obligasi
	DER
	ICR
Risiko Spesifik	Reputasi
Risiko Inflasi	Rasio
	Kupon/Ekspektasi
	Inflasi Tahunan

e. Reksa Dana

Risiko atas penempatan aset investasi pada Reksa Dana berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai investasi, yang timbul akibat faktor perubahan isu di pasar modal maupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi penurunan kinerja investasi Reksa Dana. Aspek dan indikator risiko penempatan Reksa Dana sebagai berikut :

- Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham

Aspek Risiko	Indikator
Risiko Pasar	Prospek Benchmark
	Volatilitas Value at Risk
	Volatilitas Downside Risk
Risiko Regulasi	Kepatuhan
Risiko Likuiditas	Kelas AUM
Risiko Spesifik	Reputasi MI



**-Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbasis Equity dan Berbasis Utang**

Aspek Risiko	Indikator
1. RD Penyertaan Terbatas berbasis Equity	
Faktor Kuantitatif	Profitabilitas (IRR) Solvabilitas (DER)
Faktor Kualitatif	Prospek Usaha Regulasi Reputasi Manager
2. RD Penyertaan Terbatas berbasis Utang	
Faktor Kuantitatif	Z-Score Penerbit DER ICR
Faktor Kualitatif	Prospek Usaha Regulasi Reputasi Manajer Investasi

**f. Saham**

Risiko atas penempatan aset investasi di Saham Indonesia berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai investasi yang timbul akibat faktor perubahan isu di pasar saham maupun fundamental emiten. Aspek dan indikator risiko penempatan Saham sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator	
Pasar	Volatilitas Harga	Unrealized Gain (Loss)
		VaR
Fundamental	Profitabilitas	CAGR Laba Bersih 3 Tahun Operating Margin
	Valuation	Potential Gain (Loss)
		Prospek Industri
	Aksi Korporasi per Emiten	
Likuiditas	Kelompok Indeks	

**g. Penyertaan Langsung**

Risiko atas penempatan aset investasi pada Penyertaan Langsung berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai maupun manfaat investasi yang timbul akibat perubahan kondisi fundamental serta faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kerugian investasi di Penyertaan Langsung. Aspek dan indikator risiko penempatan Penyertaan Langsung sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
Aspek Risiko	Indikator
Aspek Kuantitatif	Profitabilitas (IRR)
	Solvabilitas (DER)
Aspek Kualitatif	Prospek Usaha
	Regulasi
	Legalitas
	Reputasi Manajemen

h. Tanah dan Bangunan

Risiko atas penempatan aset investasi pada Tanah dan atau Bangunan berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai maupun manfaat investasi yang timbul akibat perubahan kondisi serta faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kerugian investasi di Tanah dan atau Bangunan. Aspek dan indikator risiko penempatan Tanah dan Bangunan sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
Faktor Kuantitatif	Imbal Hasil (Return)
	Valuasi
Faktor Kualitatif	Prospek Usaha
	Regulasi
	Legalitas
	Kepemilikan

### BAB III LAPORAN ADMINISTRASI DANA BELANJA PENSIUN APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero), dalam Pasal 5 disebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) dihimbau untuk membuka rekening yang digunakan khusus untuk menampung Dana Belanja Pensiun berdasarkan persetujuan dari KPA BUN dan melakukan penyetoran Jasa Giro atas rekening tersebut ke Kas Negara. Sebagai turunan dari Peraturan tersebut, telah terbit Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015, tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang terakhir diubah pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018. Sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut, PT TASPEN (Persero) telah melakukan pemisahan rekening antara Belanja Pensiun (APBN) dan rekening Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP). Sehingga terhitung mulai Bulan Agustus 2015 laporan keuangan telah disajikan dengan format yang telah disesuaikan yaitu pemisahan Laporan dan transaksi Keuangan Program Pensiun yang berasal dari DAIP dan Dana APBN. Selain itu telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor: PD-43/DIR/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Tata Cara Pencairan, Penyaluran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun.

#### A. Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Realisasi jumlah penerima manfaat pensiun pada Semester II Tahun 2021 adalah sebanyak 2.847.034 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp48.865.347.997.050,- mencapai masing-masingnya sebesar 96% dan 43,62% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, mengalami peningkatan sebanyak 1.765 orang atau naik 0,06% namun untuk jumlah pembayaran mengalami penurunan sebesar Rp13.776.525.584.604,- atau turun 21,99%. Hal ini disebabkan oleh pembayaran Pensiun 13 sebesar Rp7.372.918.324.530,- dan THR sebesar Rp7.605.009.917.974,- pada Semester I Tahun 2021.

Gambaran jumlah penerima manfaat pensiun menurut kelompok pensiun dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

Tabel 26  
Jumlah Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun Menurut Kelompok Pensiun  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester II Tahun 2020

KELOMPOK PENERIMA	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian 2021		% Naik/Turun	
			Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021					
	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4/2)	(9=5/3)	(10=4/6)	(11=7/5)
PNS DAN PEJABAT NEGARA										
A. TAHUN BERJALAN										
PNS PUSAT	873.097	30.238.461.598.550	828.255	12.601.195.191.978	848.744	12.571.372.581.869	94,86	41,67	(2,41)	0,24
PNS DO	1.829.994	74.471.698.498.575	1.769.360	33.130.970.963.981	1.730.104	31.643.551.992.008	96,69	44,49	2,27	4,70
HAKIM	3.767	182.130.738.454	3.640	75.760.358.096	3.571	73.317.325.644	96,63	41,60	1,93	3,33
PEJABAT NEGARA	6.387	175.791.528.162	5.907	67.233.083.604	5.928	67.970.025.111	92,48	38,25	(0,35)	(1,08)
TNI/POLRI	111.932	2.770.169.404.172	104.710	1.018.164.678.401	113.543	1.086.565.041.139	93,55	36,75	(7,78)	(6,30)
VETERAN	110.122	3.148.642.051.685	107.477	947.267.218.100	114.735	999.716.016.392	97,60	30,08	(6,33)	(5,25)
PKRI/KNIP	439	12.911.889.705	423	5.988.408.530	457	5.346.201.832	96,36	46,38	(7,44)	12,01
DANA KEHORMATAN	3.211	31.751.639.160	1.585	266.589.720.000	1.830	286.206.114.000	49,36	839,61	(13,39)	(6,85)
PEGADAIAN	600	17.273.125.289	539	5.404.829.553	584	5.908.440.215	89,83	31,29	(7,71)	(8,52)
PENSIUN 13	-	-	-	343.086.464.293	-	7.372.918.324.530	-	-	-	(95,35)
THR	-	-	-	56.033.915.450	-	7.605.009.917.974	-	-	-	(99,26)
TAHUN BERJALAN	2.939.549	111.048.830.473.752	2.821.896	48.517.694.831.986	2.819.496	61.717.881.980.714	96,00	43,69	0,09	(21,39)

*Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -  
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021*

KELOMPOK PENERIMA	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian 2021		% Naik/Turun	
			Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021					
	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4/2)	(9=5/3)	(10=4/6)	(11=7/5)
B. SEBELUM TAHUN BERJALAN	-	-	-	(28.870.410.296)		419.247.313.399	-	-	-	(106,89)
PNS DAN PEJABAT NEGARA	2.939.549	111.048.830.473.752	2.821.896	48.488.824.421.690	2.819.496	62.137.129.294.113	96,00	43,66	0,09	(21,96)
PNS EKS PNS DEPHUB PADA PT KAI	26.175	974.307.036.333	25.138	376.523.575.360	25.773	504.744.287.541	96,04	38,65	(2,46)	(25,40)
JUMLAH	2.965.724	112.023.137.510.085	2.847.034	48.865.347.997.050	2.845.269	62.641.873.581.654	96,00	43,62	0,06	(21,99)

Sumber : Accounting Division & Membership Division

**a. PNS Pusat**

Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Pusat Semester II Tahun 2021 sebanyak 828.255 orang dengan nilai pembayaran sebesar Rp12.601.195.191.978,- mencapai 94,86% dan 41,67% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Pusat bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 20.489 orang atau turun 2,41%.

**b. PNS Daerah Otonom**

Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Daerah Otonom Semester II Tahun 2021 sebanyak 1.769.360 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp33.130.970.963.981,- mencapai 96,69% dan 44,49% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Daerah Otonom bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 39.256 orang atau naik 2,27%.

**c. Hakim**

Jumlah penerima manfaat pensiun Hakim Tahun Semester II Tahun 2021 sebanyak 3.640 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp75.760.358.096,- mencapai 96,63% dan 41,60% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun Hakim bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 69 orang atau naik 1,93%.

**d. Pejabat Negara**

Jumlah penerima manfaat pensiun Pejabat Negara Tahun Semester II Tahun 2021 sebanyak 5.907 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp67.233.083.604,- mencapai 92,48% dan 38,25% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun Pejabat Negara bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 21 orang atau turun 0,35%.

**e. TNI/POLRI**

Jumlah penerima manfaat pensiun TNI/POLRI Semester II Tahun 2021 sebanyak 104.710 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp1.018.164.678.401,- mencapai 93,55% dan 36,75% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun TNI/POLRI bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 8.833 orang atau turun 7,78%.

Menurunnya jumlah penerima manfaat pensiun TNI/POLRI ini dikarenakan penerima

pensiun meninggal dunia tanpa ahli waris (punah) serta Yatim Piatu yang telah dewasa, dan sejak 1 April 1989 PT TASPEN (Persero) tidak lagi membayarkan manfaat pensiun peserta TNI/POLRI yang mengalami Pensiun karena telah dialihkan pembayarannya melalui PT ASABRI (Persero).

**f. Veteran**

Jumlah penerima Tunjangan Veteran Semester II Tahun 2021 sebanyak 107.477 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp947.267.218.100,- mencapai 97,60% dan 30,08% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima Tunjangan Veteran bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 7.258 orang atau turun 6,33%

**g. PKRI/KNIP**

Jumlah penerima Tunjangan PKRI/KNIP Semester II Tahun 2021 sebanyak 423 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp5.988.408.530,- mencapai 96,36% dan 46,38% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima Tunjangan PKRI/KNIP bila dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 34 orang atau turun 7,44%. Penurunan jumlah penerima ini akan terus terjadi, karena tidak adanya pengajuan penerima Tunjangan PKRI/KNIP yang baru serta penerima tunjangan yang ada sudah tidak memiliki ahli waris (punah) mengingat anggota PKRI/KNIP merupakan pelaku sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

**h. Dana Kehormatan**

Jumlah penerima Tunjangan Dana Kehormatan Semester II Tahun 2021 sebanyak 1.585 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp266.589.720.000,- mencapai 49,36% dan 839,61% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima Tunjangan Dana Kehormatan bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 245 orang atau turun 13,39%. Penurunan ini dikarenakan terdapat penerima dana kehormatan yang meninggal dan tunjangan dana kehormatan hanya melekat pada penerima tunjangan dana kehormatan, tidak diturunkan kepada ahli warisnya (istri/suami/anak).

**i. Pegadaian**

Jumlah penerima manfaat pensiun Pegadaian Semester II Tahun 2021 sebanyak 539 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp5.404.829.553,- mencapai 89,83% dan 31,29% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun Pegadaian bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 45 orang atau turun 7,71%. Penurunan ini akan terus terjadi karena tidak adanya peserta baru dan penerima manfaat pensiun yang ada sudah tidak memiliki ahli waris (punah), mengingat bahwa penerima manfaat pensiun ini merupakan penerima manfaat pensiun PNS eks Departemen Keuangan yang dialihkan pembayarannya dari Dana Pensiun Pegadaian kepada PT TASPEN (Persero) terhitung mulai tanggal 1 September 2004, berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: S-2348/A/2004 tanggal 31 Mei 2004.

**j. Pensiun ke 13**

Jumlah pembayaran Pensiun ke 13 Semester II Tahun 2021 sebesar Rp343.086.464.293,- merupakan pembayaran Pensiun 13 pada tahun 2021 yang belum

direalisasikan pada Semester I Tahun 2021.

**k. Tunjangan Hari Raya (THR)**

Jumlah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Semester II Tahun 2021 sebesar Rp56.033.915.450,- merupakan pembayaran THR untuk tahun 2021 yang belum direalisasikan pada Semester I Tahun 2021.

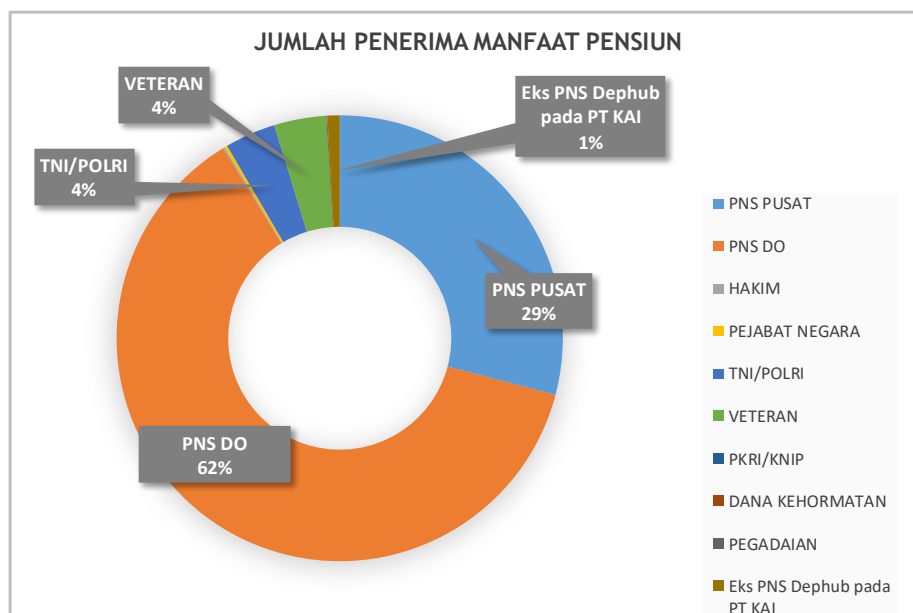
**l. Jumlah Manfaat Pensiun Sebelum Tahun Berjalan**

Jumlah pembayaran Manfaat Pensiun Sebelum Tahun Berjalan Semester II Tahun 2021 sebesar minus Rp28.870.410.296- merupakan penerimaan kembali pembayaran Manfaat Pensiun karena tidak berhak yang telah dipertanggungjawabkan pada tahun sebelumnya.

**m. Manfaat Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI**

Jumlah peserta Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI Semester II Tahun 2021 sebanyak 25.138 orang dengan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp376.523.575.360,- mencapai 96,04% dan 38,65%. Pembayaran Manfaat Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI mendasari PP Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PMK 1170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetorkan Past Service Liability ke PT TASPEN (Persero) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp79.500.000.000,- per tahun. Dan pada saat program penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub berakhir, Akumulasi Dana Pensiun ex PNS Dephub pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Grafik : 3  
Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Semester II Tahun 2021



Gambaran jumlah penerima manfaat pensiun menurut jenis pensiun dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

Tabel 27  
Jumlah Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun Menurut Jenis Pensiun  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

JENIS PENERIMA PENSIUN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/Turun
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
<b>PNS dan Pejabat Negara</b>					
1 Sendiri	1.809.878	1.733.708	1.730.232	95,79	0,20
2 Janda/Duda	1.082.936	1.045.578	1.047.961	96,55	(0,23)
3 Yatim/Piatu	46.529	42.402	41.086	91,13	3,20
4 Orang Tua	206	208	217	100,93	(4,15)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.939.550</b>	<b>2.821.896</b>	<b>2.819.496</b>	<b>96,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Eks PNS Dephub pada PT KAI</b>					
1 Sendiri	17.354	16.335	17.132	94,13	(4,65)
2 Janda/Duda	8.668	8.638	8.484	99,66	1,82
3 Yatim/Piatu	152	165	157	108,35	5,10
4 Orang Tua	-	-	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>26.175</b>	<b>25.138</b>	<b>25.773</b>	<b>96,04</b>	<b>(2,46)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.965.724</b>	<b>2.847.034</b>	<b>2.845.269</b>	<b>96,00</b>	<b>0,06</b>

Sumber : Actuarial Division & Membership Division

Realisasi Jumlah penerima manfaat pensiun pada Semester II Tahun 2021 sebanyak 2.847.034 orang, mencapai 96% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 1.765 orang atau naik 0,06%. Peningkatan terbesar terjadi pada Pensiun Sendiri PNS dan Pejabat Negara yang mengalami peningkatan sebanyak 3.476 orang atau naik 0,20%. Sementara untuk Pensiun Janda/Duda mengalami penurunan sebanyak 2.383 orang atau turun 0,23%.

Rekapitulasi jumlah penerima manfaat pensiun menurut kelompok pensiun dan rekapitulasi jumlah penerima manfaat pensiun menurut jenis pensiun pada masing-masing Kantor Cabang dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

*Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -  
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021*

**Tabel 28**  
**Jumlah Penerima Manfaat Pensiun**  
**Menurut Kelompok Pensiun Pada Kantor Cabang**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021**

NO	NAMA CABANG	Semester II Tahun 2021										TOTAL
		PNS PUSAT	PNS DO	HAKIM	PEJ. NEGARA	PKRI/KNIP	VETERAN	TNI/POL	PEGADAIAN	DAHOR	EKS PNS DEPHUB PADA PT KAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(3) sd (12)
1	100 JAKARTA	53.451	42.548	305	1.361	55	3.204	5.624	20	71	646	107.285
2	101 BANDAR LAMPUNG	15.443	46.671	87	79	5	1.179	1.939	2	27	906	66.338
3	102 BENGKULU	5.025	18.192	25	52	-	163	474	-	1	1	23.933
4	103 PALEMBANG	13.378	37.998	86	74	-	647	1.769	2	6	1.070	55.030
5	104 PALANGKARAYA	5.505	23.332	18	71	-	1.288	438	1	47	-	30.700
6	105 PONTIANAK	7.941	34.877	18	89	-	566	836	2	1	-	44.330
7	106 PANGKAL PINANG	1.564	7.841	5	29	-	26	211	4	-	1	9.681
8	107 TANGERANG	23.775	16.929	83	171	4	359	844	-	10	146	42.321
9	108 TARAKAN	607	3.464	-	15	-	712	98	-	5	-	4.901
10	109 JAKARTA SELATAN	19.785	10.635	87	766	13	1.326	1.772	1	34	74	34.493
11	110 LUBUK LINGGAU	2.657	13.180	17	14	1	275	514	1	2	764	17.425
12	200 MEDAN	23.643	57.796	183	125	-	2.069	4.318	9	51	1.849	90.043
13	201 BANDA ACEH	8.772	25.550	75	85	-	5.112	1.307	4	127	3	41.035
14	202 PEMATANG SIANTAR	11.519	44.369	34	37	2	1.484	1.235	6	12	260	58.958
15	203 BUKITTINGGI	10.018	19.697	72	32	8	920	1.013	4	14	126	31.904
16	204 PADANG	16.958	31.784	85	72	23	1.597	1.269	5	11	805	52.609
17	205 PEKANBARU	12.106	28.412	52	71	2	530	633	1	-	4	41.811
18	206 JAMBI	7.979	27.393	45	59	1	594	786	2	4	2	36.865
19	207 TANJUNG PINANG	4.226	5.177	4	27	-	306	206	-	-	-	9.946
20	208 LHOKEUMAWA	4.736	18.714	32	27	-	3.303	825	2	151	2	27.792
21	209 KEPULAUAN NIAS	1.016	4.857	-	8	-	25	34	-	-	-	5.940
22	300 BANDUNG	50.835	70.569	194	276	21	6.756	10.702	24	37	2.592	142.006
23	301 BOGOR	31.697	39.131	60	120	22	3.560	4.630	8	29	622	79.879
24	302 TASIKMALAYA	18.108	43.729	50	33	17	6.179	4.456	26	8	897	73.503
25	303 CIREBON	14.564	37.014	53	32	1	3.322	2.185	33	7	834	58.045
26	304 SERANG	10.794	22.227	31	30	5	1.292	988	4	22	280	35.673
27	305 DEPOK	16.081	8.115	39	102	1	1.143	1.028	4	10	387	26.910
28	306 BEKASI	23.715	24.753	84	140	5	1.495	1.828	7	3	686	52.716
29	400 SEMARANG	50.044	96.454	224	178	9	3.901	5.242	61	13	2.139	158.265
30	401 PURWOKERTO	32.824	60.797	94	48	6	2.584	4.049	28	3	1.696	102.129
31	402 SURAKARTA	30.625	67.202	131	73	9	3.699	3.135	31	31	811	105.747
32	403 YOGYAKARTA	34.706	52.951	227	133	2	2.288	2.646	35	19	1.237	94.244
33	404 PEKALONGAN	13.118	37.689	59	37	-	1.996	1.500	22	14	681	55.116
34	500 SURABAYA	43.422	68.260	231	177	14	6.924	7.309	43	29	2.211	128.620
35	501 MALANG	19.227	48.802	120	92	8	3.566	4.901	39	13	924	77.692
36	502 MADIUN	15.979	39.348	39	31	18	1.895	2.302	22	2	720	60.356
37	503 KEDIRI	17.881	50.360	49	40	42	2.797	3.213	26	7	790	75.205
38	505 BANJARMASIN	11.352	34.745	46	29	20	1.521	2.035	26	21	902	50.697
39	506 SAMARINDA	12.914	35.543	92	99	1	1.077	1.614	1	14	-	51.355
40	507 ENDE	5.430	23.771	24	60	-	415	852	1	4	1	30.558
41	508 PAMEKASAN	2.977	18.172	1	30	-	25	159	-	-	-	21.364
42	600 MAKASSAR	8.852	17.994	15	22	14	1.149	502	10	1	63	28.622
43	601 MANADO	25.826	52.619	181	180	4	5.957	3.886	4	178	-	88.835
44	602 PALU	13.694	32.862	28	73	1	2.372	2.007	2	50	-	51.089
45	603 KENDARI	7.057	26.015	15	48	1	246	512	1	2	2	33.899
46	604 AMBON	5.303	26.914	22	58	-	516	575	-	4	-	33.392
47	605 JAYAPURA	6.402	19.040	15	30	1	1.525	810	5	22	-	27.850
48	606 GORONTALO	3.772	20.483	7	61	34	585	315	-	9	-	25.266
49	607 TERNATE	3.024	9.814	9	30	-	48	178	1	-	-	13.104
50	608 MAMUJU	1.790	8.258	7	28	-	150	245	-	1	-	10.479
51	609 MANOKWARI	2.604	9.195	7	18	-	837	363	-	132	-	13.156
52	610 PALOPO	1.834	8.714	2	34	44	341	175	-	1	-	11.145
53	611 BONE	4.159	12.741	10	13	-	2.432	1.165	-	220	-	20.740
54	700 DENPASAR	5.213	14.355	26	14	-	991	694	-	8	-	21.301
55	701 KUPANG	15.006	43.107	93	101	-	3.625	1.245	3	17	3	63.200
56	702 MATARAM	7.075	32.551	12	100	8	4.039	520	1	78	-	44.384
57	504 JEMBER	10.247	35.650	30	73	1	544	599	5	2	1	47.152
Jumlah		828.255	1.769.360	3.640	5.907	423	107.477	104.710	539	1.585	25.138	2.847.034

Sumber : Human Capital Division



**Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -  
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021**

NO	NAMA CABANG	Semester I Tahun 2021											% Naik/ Turun
		PNS PUSAT	PNS DO	HAKIM	PEJ. NEGARA	PKRI/KNIP	VETERAN	TNI/POL	PEGADAIAN	DAHOR	EKS PNS DEPHUB PADA PT KAI	TOTAL	
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(14) sd (23)	(25)=(13/24)
1	100 JAKARTA	54.349	42334	308	1.403	58	3.343	6.064	21	82	664	108.626	(1,23)
2	101 BANDAR LAMPUNG	15.697	44887	86	73	6	1.260	2.124	2	28	918	65.081	1,93
3	102 BENGKULU	5.099	17640	24	50	-	185	522	-	1	1	23.522	1,75
4	103 PALEMBANG	13.607	37170	90	78	2	710	1.935	2	7	1.083	54.684	0,63
5	104 PALANGKARAYA	5.646	22632	18	76	-	1.342	473	1	54	-	30.242	1,51
6	105 PONTIANAK	8.017	33755	19	83	-	586	899	2	1	-	43.362	2,23
7	106 PANGKAL PINANG	1.592	7489	5	25	-	30	228	4	1	1	9.375	3,26
8	107 TANGERANG	23.688	16475	81	175	5	382	932	-	15	150	41.903	1,00
9	108 TARAKAN	608	3329	-	11	-	700	103	-	4	-	4.755	3,07
10	109 JAKARTASELATAN	19.949	10295	87	794	14	1.360	1.877	1	40	72	34.489	0,01
11	110 LUBUK LINGGAU	2.882	12906	18	14	1	333	589	1	2	784	17.530	(0,60)
12	200 MEDAN	24.108	56638	184	125	1	2.249	4.738	11	61	1.889	90.004	0,04
13	201 BANDA ACEH	9.059	25283	76	91	-	5.576	1.466	4	162	3	41.720	(1,64)
14	202 PEMATANG SIANTAR	12.015	43132	34	37	3	1.635	1.339	8	16	262	58.481	0,82
15	203 BUKITTINGGI	10.415	18949	63	27	8	1.044	1.095	3	18	126	31.748	0,49
16	204 PADANG	17.282	30881	84	68	26	1.771	1.374	5	13	805	52.309	0,57
17	205 PEKANBARU	12.347	27235	47	69	2	570	690	1	-	4	40.965	2,07
18	206 JAMBI	8.034	26391	45	61	1	658	827	2	3	1	36.023	2,34
19	207 TANJUNG PINANG	4.519	5168	4	24	-	327	234	-	-	-	10.276	(3,21)
20	208 LHOKEUMAWA	4.954	18907	32	33	-	3.471	920	2	193	3	28.515	(2,54)
21	209 KEPULAUAN NIAS	1.052	4649	-	6	-	30	34	-	-	-	5.771	2,93
22	300 BANDUNG	52.531	68995	188	286	22	7.305	11.623	26	48	2.664	143.688	(1,17)
23	301 BOGOR	32.180	38208	61	119	23	3.884	4.987	13	32	640	80.147	(0,33)
24	302 TASIKMALAYA	18.971	42879	47	36	19	6.641	4.848	27	13	917	74.398	(1,20)
25	303 CIREBON	15.300	36423	49	30	1	3.544	2.365	37	8	869	58.626	(0,99)
26	304 SERANG	11.188	21674	33	25	5	1.402	1.083	4	24	290	35.728	(0,15)
27	305 DEPOK	16.133	8001	40	102	1	1.187	1.111	3	12	396	26.986	(0,28)
28	306 BEKASI	23.747	24024	82	140	5	1.587	1.977	7	3	714	52.286	0,82
29	400 SEMARANG	51.741	94047	217	175	10	4.237	5.698	67	16	2.190	158.398	(0,08)
30	401 PURWOKERTO	34.163	59558	89	45	6	2.758	4.368	31	6	1.729	102.753	(0,61)
31	402 SURABAYA	31.926	66123	126	65	10	4.024	3.391	32	40	833	106.570	(0,77)
32	403 YOGYAKARTA	35.232	52206	212	134	2	2.440	2.872	36	23	1.255	94.412	(0,18)
33	404 PEKALONGAN	13.736	36911	56	35	-	2.170	1.654	26	17	711	55.316	(0,36)
34	500 SURABAYA	44.729	66284	224	180	14	7.295	7.957	46	34	2.270	129.033	(0,32)
35	501 MALANG	19.769	48011	123	93	8	3.820	5.344	42	19	965	78.194	(0,64)
36	502 MADIUN	16.762	38728	39	28	20	2.015	2.476	23	3	731	60.825	(0,77)
37	503 KEDIRI	18.854	49609	51	37	47	3.023	3.523	29	10	830	76.013	(1,06)
38	505 BANJARMASIN	13.122	34708	86	96	1	1.147	1.752	1	18	-	50.931	(0,46)
39	506 SAMARINDA	5.421	22965	22	54	-	430	903	1	4	1	29.801	72,33
40	507 ENDE	3.192	18589	1	29	-	27	174	1	-	-	22.013	38,82
41	508 PAMEKASAN	9.492	17872	15	22	17	1.270	553	11	1	67	29.320	(27,14)
42	600 MAKASSAR	26.141	51551	179	186	4	6.331	4.160	4	194	-	88.750	(67,75)
43	601 MANADO	13.862	32146	28	75	1	2.441	2.166	2	55	-	50.776	74,95
44	602 PALU	6.967	24876	15	45	1	227	544	1	2	2	32.680	56,33
45	603 KENDARI	5.333	26583	22	55	-	532	617	-	4	-	33.146	2,27
46	604 AMBON	6.248	17851	18	30	1	1.571	861	5	25	-	26.610	25,49
47	605 JAYAPURA	3.664	19680	6	64	35	613	326	-	9	-	24.397	14,15
48	606 GORONTALO	3.073	9627	8	28	-	52	189	1	-	-	12.978	94,68
49	607 TERNATE	1.783	7999	7	27	-	152	264	-	1	-	10.233	28,06
50	608 MAMUJU	2.664	8937	7	18	-	901	376	-	138	-	13.041	(19,65)
51	609 MANOKWARI	1.806	8291	2	31	46	353	181	-	1	-	10.711	22,83
52	610 PALOPO	4.281	12631	10	13	-	2.631	1.234	-	234	-	21.034	(47,01)
53	611 BONE	5.368	14161	26	13	-	1.052	750	-	9	-	21.379	(2,99)
54	700 DENPASAR	15.164	42340	92	100	-	3.925	1.342	3	19	4	62.989	(66,18)
55	701 KUPANG	7.098	31813	12	95	8	3.988	541	1	82	-	43.638	44,83
56	702 MATARAM	10.374	35314	30	69	1	574	634	5	2	-	47.003	(5,57)
57	504 JEMBER	11.810	34344	43	25	22	1.624	2.236	29	23	929	51.085	(7,70)
Jumlah		848.744	1.730.104	3.571	5.928	457	114.735	113.543	584	1.830	25.773	2.845.269	0,06

Sumber : Human Capital Division

*Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -  
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021*

Tabel 29  
Jumlah Penerima Manfaat Pensiun  
Menurut Jenis Pensiun Pada Kantor Cabang  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

NO	NAMA CABANG	Semester II Tahun 2021				
		SENDIRI	JD/DD	YP	ORTU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)
1 100	JAKARTA	67.387	39100	791	7	107.285
2 101	BANDAR LAMPUNG	43.435	21770	1.127	6	66.338
3 102	BENGKULU	16.362	7050	520	1	23.933
4 103	PALEMBANG	35.881	18350	797	2	55.030
5 104	PALANGKARAYA	19.276	10694	729	1	30.700
6 105	PONTIANAK	28.302	15139	886	3	44.330
7 106	PANGKAL PINANG	6.500	2932	247	2	9.681
8 107	TANGERANG	27.459	14341	518	3	42.321
9 108	TARAKAN	3.205	1560	135	1	4.901
10 109	JAKARTASELATAN	21.966	12335	192	-	34.493
11 110	LUBUK LINGGAU	11.205	5888	330	2	17.425
12 200	MEDAN	53.822	34872	1.346	3	90.043
13 201	BANDA ACEH	23.562	16146	1.321	6	41.035
14 202	PEMATANG SIANTAR	33.576	24324	1.054	4	58.958
15 203	BUKITTINGGI	21.134	10146	619	5	31.904
16 204	PADANG	34.824	16802	978	5	52.609
17 205	PEKANBARU	26.433	14129	1.246	3	41.811
18 206	JAMBI	23.660	12441	763	1	36.865
19 207	TANJUNG PINANG	6.544	3124	277	1	9.946
20 208	LHOKSEUMAWE	15.380	11410	1.001	1	27.792
21 209	KEPULAUAN NIAS	2.420	3263	257	-	5.940
22 300	BANDUNG	83.666	56978	1.353	9	142.006
23 301	BOGOR	45.371	33398	1.108	2	79.879
24 302	TASIKMALAYA	41.370	30980	1.145	8	73.503
25 303	CIREBON	32.119	24754	1.168	4	58.045
26 304	SERANG	19.970	14994	709	-	35.673
27 305	DEPOK	16.863	9753	294	-	26.910
28 306	BEKASI	32.561	19416	736	3	52.716
29 400	SEMARANG	98.558	58388	1.305	14	158.265
30 401	PURWOKERTO	63.458	37751	906	14	102.129
31 402	SURAKARTA	66.787	38165	790	5	105.747
32 403	YOYAKARTA	63.260	30390	587	7	94.244
33 404	PEKALONGAN	32.356	21962	796	2	55.116
34 500	SURABAYA	76.513	50890	1.207	10	128.620
35 501	MALANG	45.822	31099	764	7	77.692
36 502	MADIUN	37.664	22177	511	4	60.356
37 503	KEDIRI	46.123	28374	702	6	75.205
38 504	JEMBER	28.490	19870	535	3	48.898
39 505	BANJARMASIN	30.941	21102	1.107	4	53.154
40 506	SAMARINDA	19.060	10689	808	1	30.558
41 507	ENDE	14.125	6956	282	1	21.364
42 508	PAMEKASAN	15.077	13081	464	-	28.622
43 600	MAKASSAR	54.429	32854	1.535	17	88.835
44 601	MANADO	33.883	16616	585	5	51.089
45 602	PALU	20.391	12362	1.144	2	33.899
46 603	KENDARI	20.347	11857	1.185	3	33.392
47 604	AMBON	17.169	10082	598	1	27.850
48 605	JAYAPURA	13.633	10802	831	-	25.266
49 606	GORONTALO	8.294	4248	562	-	13.104
50 607	TERNATE	5.795	4238	446	-	10.479
51 608	MAMUJU	7.688	5108	358	2	13.156
52 609	MANOKWARI	5.915	4864	366	-	11.145
53 610	PALOPO	12.721	7697	319	3	20.740
54 611	BONE	13.204	7665	431	1	21.301
55 700	DENPASAR	45.095	17858	238	9	63.200
56 701	KUPANG	29.216	14515	651	2	44.384
57 702	MATARAM	29.776	16467	907	2	47.152
Jumlah		1.750.043	1.054.216	42.567	208	2.847.034

Sumber : Membership Division

*Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -  
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021*

NO	NAMA CABANG	Semester I Tahun 2021					% Naik/ Turun
		SENDIRI	JD/DD	YP	ORTU	JUMLAH	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=8+9+10+11	(13=7/12)
1 100	JAKARTA	68.362	39480	777	7	108.626	(1,23)
2 101	BANDAR LAMPUNG	42.548	21445	1.082	6	65.081	1,93
3 102	BENGKULU	15.985	7033	503	1	23.522	1,75
4 103	PALEMBANG	35.550	18359	773	2	54.684	0,63
5 104	PALANGKARAYA	18.948	10554	739	1	30.242	1,51
6 105	PONTIANAK	27.709	14799	851	3	43.362	2,23
7 106	PANGKAL PINANG	6.289	2851	233	2	9.375	3,26
8 107	TANGERANG	27.565	13873	462	3	41.903	1,00
9 108	TARAKAN	3.108	1512	134	1	4.755	3,07
10 109	JAKARTASELATAN	21.987	12317	185	-	34.489	0,01
11 110	LUBUK LINGGAU	11.041	6166	321	2	17.530	(0,60)
12 200	MEDAN	53.430	35278	1.293	3	90.004	0,04
13 201	BANDA ACEH	23.758	16635	1.321	6	41.720	(1,64)
14 202	PEMATANG SIANTAR	33.019	24424	1.033	5	58.481	0,82
15 203	BUKITTINGGI	20.894	10249	600	5	31.748	0,49
16 204	PADANG	34.513	16824	968	4	52.309	0,57
17 205	PEKANBARU	25.907	13821	1.233	4	40.965	2,07
18 206	JAMBI	23.021	12272	729	1	36.023	2,34
19 207	TANJUNG PINANG	6.472	3528	275	1	10.276	(3,21)
20 208	LHOKSEUMAWE	15.764	11757	993	1	28.515	(2,54)
21 209	KEPULAUAN NIAS	2.324	3203	244	-	5.771	2,93
22 300	BANDUNG	84.479	57910	1.289	10	143.688	(1,17)
23 301	BOGOR	45.385	33731	1.029	2	80.147	(0,33)
24 302	TASIKMALAYA	41.553	31727	1.110	8	74.398	(1,20)
25 303	CIREBON	32.460	25028	1.135	3	58.626	(0,99)
26 304	SERANG	19.981	15064	683	-	35.728	(0,15)
27 305	DEPOK	17.041	9678	267	-	26.986	(0,28)
28 306	BEKASI	32.569	19027	687	3	52.286	0,82
29 400	SEMARANG	98.624	58459	1.297	18	158.398	(0,08)
30 401	PURWOKERTO	63.766	38068	905	14	102.753	(0,61)
31 402	SURAKARTA	67.308	38474	783	5	106.570	(0,77)
32 403	YOGYAKARTA	63.329	30492	583	8	94.412	(0,18)
33 404	PEKALONGAN	32.514	22043	757	2	55.316	(0,36)
34 500	SURABAYA	76.898	50980	1.145	10	129.033	(0,32)
35 501	MALANG	45.923	31544	720	7	78.194	(0,64)
36 502	MADIUN	37.801	22518	501	5	60.825	(0,77)
37 503	KEDIRI	46.295	29028	682	8	76.013	(1,06)
57 504	JEMBER	29.469	21101	509	6	51.085	(4,28)
38 505	BANJARMASIN	29.840	19978	1.112	1	50.931	4,36
39 506	SAMARINDA	18.624	10415	761	1	29.801	2,54
40 507	ENDE	13.949	7788	276	-	22.013	(2,95)
41 508	PAMEKASAN	15.359	13509	452	-	29.320	(2,38)
42 600	MAKASSAR	54.513	32712	1.507	18	88.750	0,10
43 601	MANADO	33.652	16555	564	5	50.776	0,62
44 602	PALU	20.041	11559	1.078	2	32.680	3,73
45 603	KENDARI	20.282	11720	1.141	3	33.146	0,74
46 604	AMBON	16.862	9166	581	1	26.610	4,66
47 605	JAYAPURA	13.362	10226	809	-	24.397	3,56
48 606	GORONTALO	8.233	4201	544	-	12.978	0,97
49 607	TERNATE	5.709	4094	430	-	10.233	2,40
50 608	MAMUJU	7.660	5020	359	2	13.041	0,88
51 609	MANOKWARI	5.787	4595	329	-	10.711	4,05
52 610	PALOPO	12.830	7899	302	3	21.034	(1,40)
53 611	BONE	13.217	7740	422	-	21.379	(0,36)
54 700	DENPASAR	44.960	17787	232	10	62.989	0,33
55 701	KUPANG	28.989	14030	617	2	43.638	1,71
56 702	MATARAM	29.906	16199	896	2	47.003	0,32
Jumlah		1.747.364	1.056.445	41.243	217	2.845.269	0,06

Sumber : Membership Division

## B. Penyelesaian Klaim

Realisasi penyelesaian klaim Program Pensiun pada Semester II Tahun 2021 sebanyak 346.479 kejadian mencapai 63,24% dari RKA Tahun 2021, sementara capaian realisasi pembayaran sebesar Rp2.297.789.682.349,- mencapai 63,24% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 14.101 kejadian dengan peningkatan pembayaran klaim sebesar Rp428.582.830.307,- atau naik 4,24% dan 22,93%. Kontribusi peningkatan atas kejadian dan pembayaran klaim diantaranya dialami oleh kelompok Pensiun Janda Duda (SP4B) yang meningkat sebanyak 12.179 kejadian dan Rp148,321,785.356,- atau naik 27,59% dan 75,02%.

Secara ringkas Rincian Penyelesaian dan Realisasi Pembayaran Klaim Pensiun Semester II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30  
Jumlah Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Pensiun  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

KELOMPOK PENERIMA	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian 2021		% Naik/Turun	
			Semester II Tahun 2021		Semester I Tahun 2021					
	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(4/2)	(9=(5/3)	(10=4/6)	(11=7/5)
1 Pensiun Pertama Sendiri (SP4A)	155.277	1.135.898.030.172	76.310	608.242.697.006	82.378	572.191.746.840	49,14	53,55	(7,37)	6,30
2 Pensiun Janda Duda (SP4B)	74.259	342.978.304.404	56.327	346.039.035.464	44.148	197.717.250.108	75,85	100,89	27,59	75,02
3 Pensiun Yatim Piatu (YP)	5.077	95.531.916.846	4.250	95.255.172.173	3.604	36.852.150.408	83,71	99,71	17,92	158,48
4 Pensiun 3 Bulan Tidak Diambil (SP3B)	31.063	129.095.139.316	7.536	74.359.308.862	23.401	118.044.541.744	24,26	57,60	(67,80)	(37,01)
5 Uang Duka Wafat (SP2UDW)	131.038	890.286.793.409	113.787	818.978.871.037	77.558	592.375.470.400	86,84	91,99	46,71	38,25
6 Uang Kekurangan Pensiun (SP2UKP)	10.659	32.128.384.424	2.735	1.382.735.274	1.911	12.231.419.601	25,66	4,30	43,12	(88,70)
7 Pensiun Lanjutan (SP3L)	40.780	212.103.350.601	15.253	99.349.426.369	29.760	126.005.377.497	37,40	46,84	(48,75)	(21,15)
8 SP3IP	3.807	154.214.852.326	1.323	54.680.851.104	1.346	50.986.317.664	34,75	35,46	(1,71)	7,25
9 Dana Kehormatan	1.540	1.561.026.405	46	20.553.998.000	13	64.722.000	2,99	1.316,70	253,85	31.657,36
10 Pensiun 13	47.061	109.604.478.137	48.339	118.297.575.843	40.804	101.113.572.850	102,72	107,93	18,47	16,99
11 THR	47.303	115.172.186.842	20.573	60.650.011.217	27.455	61.624.282.930	43,49	52,66	(25,07)	(1,58)
JUMLAH	547.864	3.218.574.462.882	346.479	2.297.789.682.349	332.378	1.869.206.852.042	63,24	71,39	4,24	22,93

Exclude : Klaim Eks PNS Dephub pada PT KAI

Sumber : Actuarial Division, Membership Division & Accounting Division

## C. Jumlah Aset atau Liabilitas serta Sisa Dana Belanja Pensiun

Jumlah Aset atau Liabilitas serta sisa dana belanja pensiun Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.901.888.510.265,- mencapai 93.57% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp255.224.189.084,- atau turun sebesar 2,79%.

Sebagai gambaran atas laporan administratif Dana Belanja Pensiun APBN dapat dilihat pada tabel berikut:

*Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -  
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2021*

Tabel 31  
Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/Turun
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
<b>1. ASET</b>					
Kas dan Bank					
- Kas	2.740.311	1.655.200	1.808.400	60,40	(8,47)
- Bank	666.190.839.457	709.103.982.260	757.272.862.757	106,44	(6,36)
Piutang Saldo Uang Pensiun	-	-	-	-	-
Piutang Kepada :					
- Pemerintah	-	-	-	-	-
- Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS	-	-	25.174.623	-	(100,00)
Piutang Lain-lain	6.060.407	21.181.719	66.013.740	349,51	(67,91)
Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka	8.116.213.786.706	7.713.638.116.383	7.685.178.640.345	95,04	0,37
Manfaat Pensiun Belum Otentikasi	731.112.341.510	479.123.574.703	714.568.199.484	65,53	(32,95)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>9.513.525.768.391</b>	<b>8.901.888.510.265</b>	<b>9.157.112.699.349</b>	<b>93,57</b>	<b>(2,79)</b>
<b>2. LIABILITAS</b>					
Utang Manfaat Pensiun	9.129.947.627	15.364.001.932	26.811.048.910	168,28	(42,70)
Utang Kepada :					
- Pemerintah	7.265.562.689	-	-	-	-
Utang kepada Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS	8.116.213.786.706	7.565.311.324.300	-	93,21	-
Utang Kepada Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI		12.184.400	21.411.000	-	(100,00)
Utang Potongan Penyaluran Dapem	187.457.867.983	316.313.278.936	173.624.405.522	168,74	82,18
Utang Jasa Giro	3.093.554.398	2.617.732.565	1.546.111.006	84,62	69,31
Utang Lain-lain	9.574.583	9.020.950	1.127.550	94,22	700,05
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>8.323.170.293.985</b>	<b>7.899.627.543.083</b>	<b>202.004.103.988</b>	<b>94,91</b>	<b>3.810,63</b>
<b>3. Sisa Dana Belanja Pensiun Periode Lalu</b>	<b>1.190.355.474.406</b>	<b>8.955.108.595.361</b>	<b>1.046.230.553.909</b>	<b>752,31</b>	<b>755,94</b>
<b>4. Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan</b>					
Penambahan					
- Penerimaan Dana Pemerintah	111.399.012.758.709	41.031.471.793.901	70.484.047.921.909	36,83	(41,79)
- Pendapatan Lain-lain	-	2.061	579	-	255,96
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>111.399.012.758.709</b>	<b>41.031.471.795.962</b>	<b>70.484.047.922.488</b>	<b>36,83</b>	<b>(41,79)</b>
Pengurangan					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	111.048.830.473.752	48.488.824.421.690	62.137.129.294.113	43,66	(21,96)
- Pengembalian Dana Pemerintah	350.182.284.957	495.495.002.451	438.040.586.923	141,50	13,12
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>111.399.012.758.709</b>	<b>48.984.319.424.141</b>	<b>62.575.169.881.036</b>	<b>43,97</b>	<b>(21,72)</b>
<b>Saldo Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan</b>	<b>-</b>	<b>(7.952.847.628.179)</b>	<b>7.908.878.041.452</b>	<b>-</b>	<b>(200,56)</b>
<b>5. Sisa Dana Belanja Pensiun</b>	<b>1.190.355.474.406</b>	<b>1.002.260.967.182</b>	<b>8.955.108.595.361</b>	<b>84,20</b>	<b>(88,81)</b>
<b>6. Jumlah Liabilitas dan Sisa Dana Belanja Pensiun</b>	<b>9.513.525.768.391</b>	<b>8.901.888.510.265</b>	<b>9.157.112.699.349</b>	<b>93,57</b>	<b>(2,79)</b>

Sumber : Accounting Division

**1. Aset**

**a. Kas dan Bank**

Pada Semester II Tahun 2021 saldo masing-masing kas dan bank sebesar Rp1.655.200,- dan Rp709.103.982.260,- .

- b. **Piutang Saldo Uang Pensiun**  
Piutang Saldo Uang Pensiun merupakan penyaluran manfaat pensiun kepada Mitra Bayar Perbankan, yang belum diambil atau belum Diautentikasi oleh penerima pensiun selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut. Piutang Saldo Uang Pensiun (PSUP) pada periode Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar nihil.
- c. **Piutang kepada Pemerintah**  
Piutang kepada pemerintah merupakan tagihan kekurangan dropping dana belanja pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun yang disetorkan ke PT TASPEN (Persero) setiap bulan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PT TASPEN (Persero) dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Piutang pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar nihil.
- d. **Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka**  
Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp7.713.638.116.383,- dan Rp 7.685.178.640.345,-. Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka merupakan manfaat pensiun bulan berikutnya yang disalurkan kepada mitra bayar pensiun pada bulan berkenaan untuk dibayarkan kepada penerima pensiun.
- e. **Manfaat Pensiun Belum Diantentikasi**  
Manfaat Pensiun Belum Diantentikasi pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp479.123.574.703,- dan Rp714.568.199.484,- yang merupakan penyaluran manfaat pensiun kepada Mitra Bayar, yang belum diambil atau belum Diautentikasi oleh penerima pensiun selama mulai dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut.

## **2. Liabilitas dan Sisa Dana Belanja Pensiun**

- a. **Utang Manfaat Pensiun**  
Utang Manfaat Pensiun pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp15.364.001.932,- dan Rp26.811.048.910,- merupakan kewajiban yang timbul diantaranya atas Saldo Uang Pensiun (SUP) yang disetor mitra pada akhir periode laporan akibat penerimaan kembali Dana Belanja Pensiun dari Mitra Bayar karena uang pensiun tidak diambil oleh penerima pensiun, penerima pensiun meninggal dunia atau tidak berhak. Utang tersebut akan berkurang apabila diajukan kembali oleh penerima pensiun atau dikembalikan kepada Pemerintah (disetor ke Kas Negara atau melalui mekanisme kompensasi).
- b. **Utang kepada Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) PNS**  
Utang kepada Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) PNS pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp7.565.311.324.300,- merupakan penggunaan dana AIP PNS (talangan) untuk penyaluran Dapem Bulanan Januari 2022 yang dilakukan pada akhir tahun 2021 karena dropping dana dari APBN baru dapat dilakukan pada bulan Januari 2022 sesuai dengan sumber pembiayaannya yang berasal dari APBN tahun 2022 berdasarkan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-223/PB.7/2021 tanggal 7 November 2021 perihal Dana Talangan Pembayaran Manfaat Pensiun bulan Januari 2022.

**c. Utang Potongan Penyaluran Dapem**

Utang Potongan Penyaluran Dapem pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp316.313.278.936,- dan Rp173.624.405.522,- yang terdiri dari potongan atas utang pajak, utang kepada BPJS Kesehatan, Utang Kepada Kas Negara, Utang Kepada Kas Daerah dan Utang Potongan Dapem Induk.

**3. Sisa dana belanja pensiun tahun lalu pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp8.955.108.595.361,- merupakan saldo penyaluran Pensiun Semester I Tahun 2021 atas penyaluran Dapem Juli 2021.**

**4. Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan**

Saldo Dana belanja pensiun tahun berjalan pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar minus Rp7.952.847.628.179,- dan Rp7.908.878.041.452,- yang merupakan saldo penyaluran Belanja Pensiun pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021. Pengurangan pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp48.984.319.424.141,- merupakan pembayaran manfaat pensiun dan pengembalian dana Pemerintah. Pengembalian dana pemerintah sejumlah Rp495.495.002.451,- merupakan Saldo Uang Pensiun (SUP) yang telah dikembalikan oleh mitra bayar kepada PT TASPEN (Persero) karena penerima pensiun tidak berhak atau tidak mengambil uang pensiunnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pengembalian dana kepada pemerintah dicatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Belanja Pensiun antara pihak Dirjen Perbendaharaan dengan PT TASPEN (Persero).

Sisa Dana Belanja Pensiun pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp1.002.260.967.182,- dan Rp8.955.108.595.361,- merupakan akumulasi dari sisa dana belanja pensiun tahun lalu dengan sisa dana belanja pensiun tahun berjalan.

**D. Pembayaran Manfaat Pensiun APBN**

Manfaat pensiun yang dibayarkan melalui Dana APBN pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp48.488.824.421.690,- mencapai 43,66% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan manfaat pensiun yang dibayarkan pada Semester I Tahun 202, terjadi penurunan sebesar Rp13.648.304.872.423,- atau turun 21,96%. Hal ini disebabkan oleh pembayaran Pensiun 13 sebesar Rp7.372.918.324.530,- dan THR sebesar Rp7.605.009.917.974,- pada Semester I Tahun 2021.

Ikhtisar pembayaran manfaat pensiun APBN pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32  
Pembayaran Manfaat Pensiun APBN  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

JENIS PENERIMA PENSIUN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/Turun
		Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
a. Manfaat Pensiun Tahun Berjalan					
1. Manfaat Pensiun PNS	107.838.251.767.913	46.893.324.276.060	45.442.776.965.771	43,48	3,19
2. Veteran dan PKRI	3.161.553.941.390	953.255.626.630	1.005.062.218.224	30,15	(5,15)
3. Pegadaian	17.273.125.289	5.404.829.553	5.908.440.215	31,29	(8,52)
4. Pensiun 13	-	343.086.464.293	7.372.918.324.530	-	(95,35)
5. Dana Kehormatan	31.751.639.160	266.589.720.000	286.206.114.000	839,61	(6,85)
6. THR	-	56.033.915.450	7.605.009.917.974	-	(99,26)
<b>Manfaat Pensiun Tahun Berjalan</b>	<b>111.048.830.473.752</b>	<b>48.517.694.831.986</b>	<b>61.717.881.980.714</b>	<b>43,69</b>	<b>(21,39)</b>
b. Manfaat Pensiun Sebelum Tahun Berjalan	-	(28.870.410.296)	419.247.313.399	-	(106,89)
<b>Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun APBN</b>	<b>111.048.830.473.752</b>	<b>48.488.824.421.690</b>	<b>62.137.129.294.113</b>	<b>43,66</b>	<b>(21,96)</b>

Sumber : Accounting Division



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Pertimbangan dan Dukungan Kementerian Keuangan.**

Beberapa permasalahan pokok yang memerlukan pertimbangan Kementerian Keuangan antara lain:

##### **1. RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (RPP JP & JHT)**

RPP JP & JHT sedang dalam tahap pembahasan dengan kementerian terkait. Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) telah mengirimkan RPP JP & JHT usulan Kementerian PAN & RB kepada Menteri Hukum & HAM melalui surat Nomor B/1361/M.PANRB/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Harmonisasi, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS. TASPEN juga telah menyusun RPP JP & JHT versi PT TASPEN (Persero) yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan secara intensif. Pada tanggal 25 Juli 2016 melalui surat Nomor SRT-149/DIR.1/072016, PT TASPEN (Persero) telah mengusulkan sekaligus memaparkan RPP JP & JHT usulan PT TASPEN (Persero) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Proses penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua serta Kelembagaan TASPEN masih dalam tahap harmonisasi pada Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB. Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB masih melakukan pembahasan terkait tunjangan PNS yang akan dijadikan dasar pengenaan iuran. Dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 Juni 2018, Presiden memberikan arahan antara lain agar Implementasi reformasi program pensiun PNS dilaksanakan pada tahun 2020 dan pembentukan lembaga baru yang merupakan konversi dari PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi BUMN yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan pada tanggal 13-15 Maret 2020 di Bandung, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Jakarta Barat telah melakukan *Focus Group Discussion* Uji Publik Reformasi Program Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, untuk membahas :

- a. Latar belakang perlunya reformasi program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS, serta pokok-pokok kebijakan yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB;
- b. Kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS;
- c. Laporan atas penyelenggaraan pembayaran pensiun dan THT PNS sampai dengan sekarang;
- d. Kesiapan transformasi/konversi kelembagaan PT TASPEN (Persero) sebagai badan penyelenggara program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS dari segala aspek (teknologi informasi, SDM, manajemen investasi, dan sebagainya).

Setelah Uji Publik pembahasan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua dilaksanakan dengan cukup intensif oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB serta PT TASPEN (Persero). RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua semula direncanakan akan selesai pada tahun 2021 untuk kemudian diimplementasikan. Namun

dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah memutuskan untuk fokus pada penanganan Pandemi sehingga pelaksanaan reformasi Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua serta pembahasan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua untuk sementara ditunda.

Terkait Progres penyusunan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, saat ini TASPEN telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 dan 16 Juni 2021 yang antara lain membahas implementasi pemberlakuan program JP dan JHT direncanakan pada tahun 2023/2024 sesuai kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional akibat Pandemi Covid-19.

## **2. Kepesertaan Honorer/ non PNS/ non PPPK dalam JKK dan JKM**

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dalam Pasal 99 ayat (3) menyatakan: "Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK". Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) PP 49 Tahun 2018 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai Non-PNS adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau PT TASPEN (Persero).

Pasal 99 ayat (4) PP No 49 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri PAN dan RB setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan telah memberikan pertimbangan teknis pada tanggal 29 Maret 2019 melalui Surat Nomor S-253/MK.02/2019 hal Pertimbangan Teknis atas Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang JKK dan JKM bagi Pegawai Non PNS dan Non PPPK di lingkungan Instansi Pemerintah (RPermen PAN-RB JKK JKM) dan Menteri Keuangan telah mengusulkan agar Permen PAN dan RB menegaskan pengaturan PT TASPEN (Persero) sebagai Pengelola Program agar tidak menimbulkan kebingungan di tataran teknis.

PT TASPEN (Persero) sebagai lembaga pengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-PNS berdasarkan Pasal 99 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 2018 telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui pendapat hukum Nomor 35/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Nomor 57/Tuaka.TUN/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) tidak dapat mengelola JKK dan JKM bagi pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara tegas mengatur bahwa peserta program JKK dan JKM BPJS Tk adalah Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-ASN termasuk pegawai Honorer saat ini masih menunggu Peraturan Menteri PAN dan RB tentang JKK dan JKM tersebut disahkan. Adapun proses Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB saat ini dalam tahap Harmonisasi.

Pada tanggal 17 September 2021, Kementerian PAN RB melakukan FGD Harmonisasi Kebijakan Jaminan Sosial di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan para ahli. Dalam kajian menyatakan secara penalaran hukum, pasal-pasal dalam PP 49/2018 tentang

Manajemen PPPK mengamanatkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Non-PNS disamakan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana apabila merujuk pada PP 70/2015 maka pengelolaannya dilakukan oleh PT TASPEN (Persero). Kewenangan PT TASPEN (Persero) sebagai lembaga pengelola JKK dan JKM pun berdasarkan Pasal 7 PP 70/2015 telah diuji materiil dan telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 7 PP 70/2015 tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Non-PNS dikelola oleh PT TASPEN (Persero).

### **3. Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS**

Berbagai pihak memandang bahwa terdapat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Pasal tersebut antara lain Pasal 57 huruf e dan huruf f serta Pasal 65. Kedua Pasal tersebut antara lain mengatur tentang pengalihan Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Pasal-pasal terkait pengalihan tersebut sudah tidak relevan karena Jaminan Sosial bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Peraturan turunan UU ASN tersebut secara tegas menunjuk PT TASPEN (Persero) sebagai lembaga pengelola, antara lain tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN.

PT TASPEN (Persero) telah diundang oleh Badan Keahlian DPR untuk membahas terkait draf perubahan UU BPJS yang dirancang oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun pembahasan tersebut saat ini belum menemui perkembangan baru. Selain itu, UU BPJS khususnya Pasal 57 huruf e dan f dan Pasal 65 saat ini telah dilakukan Uji Materiil diajukan oleh PNS dan pensiunan PNS serta para Purnawirawan TNI. Apabila Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon Uji Materiil, maka Pasal-pasal yang dimohonkan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum meskipun UU BPJS tidak dilakukan perubahan.

Dengan dikeluarkannya Putusan No 72/PUU-XVIII/2019 atas Uji Materiil UU BPJS dan pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) pada tanggal 30 September 2021 menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi penyelesaian klaim Pengembalian Iuran 4,75% Nilai Tunai yang dibayarkan melalui Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP) pada Semester II Tahun 2021 sebanyak 1.323 kejadian atau mencapai 35,18% dari RKA Tahun 2021 dengan nilai pembayarannya sebesar Rp54.229.053.825,-. Jika dibandingkan dengan realisasi periode Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,71% atau sebanyak 23 kejadian dengan selisih nilai pembayaran naik sebesar 2.790.938.882,- atau mengalami

kenaikan sebesar 5,43%.

2. Realisasi jumlah penerima manfaat pensiun pada Semester II Tahun 2021 adalah sebanyak 2.847.034 orang mencapai sebesar 96% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, mengalami peningkatan sebanyak 1.765 orang atau naik 0,06%.
3. Realisasi penyelesaian klaim Program Pensiun pada Semester II Tahun 2021 sebanyak 346.479 kejadian mencapai 63,24% dari RKA Tahun 2021, sementara capaian realisasi pembayaran sebesar Rp2.297.789.682.349,- mencapai 63,24% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 14.101 kejadian dengan peningkatan pembayaran klaim sebesar Rp428.582.830.307,- atau naik 4,24% dan 22,93%. Kontribusi peningkatan atas kejadian dan pembayaran klaim diantaranya terjadi pada kelompok Pensiun Janda Duda (SP4B) yang meningkat sebanyak 12.179 kejadian dan Rp148,321,785.356,- atau naik 27,59% dan 75,02%.
4. Manfaat pensiun PNS dan Pejabat Negara yang dibayarkan melalui Dana APBN pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp48.865.347.997.050,- mencapai 43,62% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan manfaat pensiun yang dibayarkan pada Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.776.525.584.604,- atau turun 21,99% hal ini disebabkan oleh pembayaran Pensiun 13 sebesar Rp7.372.918.324.530,- dan THR sebesar Rp7.605.009.917.974,- pada Semester I Tahun 2021.
5. Pada Semester II Tahun 2021 realisasi nilai investasi sebesar Rp180.206.634.969.589,- mencapai 103,31% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp6.229.883.960.328,- atau naik 3,58%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pembelian instrumen keuangan dengan memanfaatkan momentum pasar terutama pada nilai instrumen investasi Deposito, Surat Utang Negara, Sukuk Pemerintah dan Reksadana.
6. Hasil investasi selama periode Semester II Tahun 2021 sebesar Rp6.767.348.478.226,- mencapai 53,41% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp736.718.224.047,- atau naik 12,22%.
7. Total Pengurangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara selama periode Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp866.730.585.739,- mencapai 50,28% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp77.315.431.896,- atau naik 9,79%.
8. Realisasi beban investasi Semester II Tahun 2021 sebesar Rp5.365.681.139,- atau mencapai 65,12% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.817.530.418,- atau naik 51,22%. Kenaikan tersebut disebabkan pada Semester II Tahun 2021 adanya beban jasa penilaian investasi.
9. Dana Bersih Semester II Tahun 2021 sebesar Rp189.836.925.320.992,- atau mencapai 102,82% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar Rp13.218.428.098.814,- atau naik 7,48%.

10. Jumlah Aset atau Liabilitas dan sisa dana belanja pensiun Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.901.888.510.265,- mencapai 93.57% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp255.224.189.084,- atau turun sebesar 2,79%.
11. Saldo Dana belanja pensiun tahun berjalan pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar minus Rp7.952.847.628.179,- dan Rp7.908.878.041.452,- yang merupakan saldo penyaluran Belanja Pensiun pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021. Pengurangan pada Semester II Tahun 2021 sebesar Rp48.984.319.424.141,- merupakan pembayaran manfaat pensiun dan pengembalian dana Pemerintah. Pengembalian dana pemerintah sejumlah Rp495.495.002.451,- merupakan Saldo Uang Pensiun (SUP) yang telah dikembalikan oleh mitra bayar kepada PT TASPEN (Persero) karena penerima pensiun tidak berhak atau tidak mengambil uang pensiunnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pengembalian dana kepada pemerintah dicatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Belanja Pensiun antara pihak Dirjen Perbendaharaan dengan PT TASPEN (Persero).  
Sisa Dana Belanja Pensiun pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp1.002.260.967.182,- dan Rp8.955.108.595.361,- merupakan akumulasi dari sisa dana belanja pensiun tahun lalu dengan sisa dana belanja pensiun tahun berjalan.

# LAMPIRAN

## 1-3

Lampiran 1

**PT TASPEN (PERSERO)**  
**AKUMULASI IURAN Pensiun PNS DAN PEJABAT NEGARA**  
**LAPORAN DANA BERSIH**  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

Rupiah

URAIAN	RKA 2021	Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021	% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
(1)	(2)	(2)	(3)	(5=3/2)	(4=2/3)
<b>1. ASET</b>					
<b>INVESTASI</b>					
Deposito	18.089.980.526.840	33.307.100.000.000,00	34.121.500.000.000	184,12	(2,39)
Obligasi :					
- Surat Utang Negara	70.592.872.964.187	82.259.363.927.530,00	81.664.393.537.224	116,53	0,73
- Obligasi Korporasi	30.234.951.935.437	17.926.389.870.080,00	17.942.052.492.990	59,29	(0,09)
Sukuk					
- Sukuk Pemerintah	24.341.141.446.052	30.704.929.291.285,00	26.306.083.020.619	-	16,72
- Sukuk Korporasi	3.283.831.887.457	105.702.473.250,00	106.319.907.750	-	(0,58)
Medium Term Notes	631.771.929.630	-	30.171.714.600	-	(100,00)
Reksadana	14.886.027.191.087	7.403.164.296.669,00	6.504.421.900.818	-	13,82
Saham	9.490.244.031.973	6.224.486.884.750,00	5.230.868.204.100	65,59	19,00
Penyertaan Langsung	2.887.659.000.000	2.227.091.226.025,00	2.022.847.231.160	77,12	10,10
Tanah dan Bangunan	-	48.407.000.000,00	48.093.000.000	-	0,65
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>174.438.480.912.663</b>	<b>180.206.634.969.589</b>	<b>173.976.751.009.261</b>	<b>103,31</b>	<b>3,58</b>
<b>ASET BUKAN INVESTASI</b>					
Kas dan Bank :					
- Kas	3.093.992	693.660,00	938.760	22,42	(26,11)
- Bank	2.359.018.163	2.414.482.223,00	1.808.519.850	102,35	33,51
Piutang Iuran	44.062.394.550	29.811.854.266,00	64.634.029.674	67,66	(53,88)
Piutang Hasil Investasi	1.950.180.087.763	2.055.443.957.265,00	2.139.725.237.452	105,40	(3,94)
Piutang Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-
Piutang Nilai Investasi	86.236.178.703	-	-	-	-
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN	8.116.213.786.706	7.565.311.324.300,00	-	93,21	-
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub	52.240.968.132	40.319.777.315,00	-	77,18	-
Piutang Lain-lain	61.839.986.263	96.390.244.072,00	22.128.962.284	155,87	335,58
Aset Lancar Lainnya	-	-	1.697.237.500	-	(100,00)
Aset Operasional :					
- Tanah	-	-	513.077.996.800	-	(100,00)
- Bangunan	-	-	214.069.913.682	-	(100,00)
- Kendaraan	132.900.000	132.900.000,00	132.900.000	100,00	-
- Komputer	4.432.131.954	2.599.562.890,00	3.392.134.395	58,65	(23,36)
- Inventaris Kantor	10.814.739.242	8.345.215.454,00	9.005.707.564	77,17	(7,33)
Aset Operasional Lain :					
- Aset Tetap Tidak Digunakan	361.613.523	181.679.736,00	306.270.823	50,24	(40,68)
- Aset Tidak Lancar Dimiliki Untuk Dijual	-	23.262.700,00	55.342.700	-	(57,97)
- Aset Tidak Berwujud	10.009.537.225	10.009.537.225,00	10.009.537.225	100,00	-
- Hak Guna Bangunan	30.388.630.149	27.594.863.465,00	30.559.630.149	90,81	(9,70)
- Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(27.395.105.124)	(34.514.695.663,00)	(145.385.416.469)	125,99	76,26
<b>Jumlah Aset Bukan Investasi</b>	<b>10.341.879.961.242</b>	<b>9.804.064.658.908</b>	<b>2.865.218.942.389</b>	<b>94,80</b>	<b>242,18</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>184.780.360.873.904</b>	<b>190.010.699.628.497</b>	<b>176.841.969.951.650</b>	<b>102,83</b>	<b>7,45</b>
<b>2. KEWAJIBAN</b>					
Utang Iuran	356.882.427	997.608.712,00	339.826.855	279,53	193,56
Utang Klaim	-	290.273.600,00	173.035.721	-	67,75
Utang Perolehan Investasi	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	251.040.267,00	104.002.062	-	141,38
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	-	75.350.000,00	-	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	-	89.089.748.065,00	89.089.748.065	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.913.173.283	-	3.658.350.815	-	(100,00)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	663.274.650,00	-	-	-
Utang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN	-	-	25.174.623	-	(100,00)
Utang Kepada Program THT	137.700.252.767	82.037.141.645,00	129.709.332.254	59,58	(36,75)
Utang Kepada Program THT-SI	-	-	3.389.311	-	(100,00)
Utang Lain-lain	-	369.870.566,00	369.869.766	-	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>143.970.308.477</b>	<b>173.774.307.505</b>	<b>223.472.729.472</b>	<b>120,70</b>	<b>(22,24)</b>
<b>Total Dana Bersih</b>	<b>184.636.390.565.427</b>	<b>189.836.925.320.992</b>	<b>176.618.497.222.178</b>	<b>102,82</b>	<b>7,48</b>

Sumber: Accounting Division

Penyajian Laporan Dana Bersih Pensiun berdasarkan PMK 169/PMK.02/2019

Lampiran 2

**PT TASPEN (PERSERO)**  
**AKUMULASI IURAN Pensiun PNS DAN PEJABAT NEGARA**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH**  
Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

Rupiah

URAIAN	RKA 2021	Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021	% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
(1)	(2)	(2)	(3)	(5=3/2)	(4=2/3)
<b>1. PENAMBAHAN</b>					
Hasil Investasi					
- Bunga Deposito	1.333.865.862.314	948.841.850.735	974.480.218.034	71,13	(2,63)
- Bunga Obligasi					
- Surat Utang Negara	5.380.251.727.200	3.153.036.441.941	2.926.861.386.966	58,60	7,73
- Obligasi Korporasi	2.070.214.178.316	717.909.638.885	782.150.666.674	34,68	(8,21)
- Imbal Hasil Sukuk					
- Sukuk Pemerintah	1.792.997.385.000	984.421.807.644	890.958.353.779	54,90	10,49
- Sukuk Korporasi	156.758.333.333	4.618.751.199	4.192.188.092	2,95	10,18
- Dividen Penyertaan	-	-	2.205.450.000	-	(100,00)
- Bunga Medium Term Notes	38.048.250.000	1.072.000.000	1.507.500.000	2,82	(28,89)
- Dividen Saham	185.807.028.699	39.385.753.550	110.424.474.461	21,20	(64,33)
- Dividen Reksadana	-	32.790.546.977	22.560.221.723	-	45,35
- Imbal Hasil Reksadana	237.072.696.000	68.360.247.887	67.679.771.365	28,84	1,01
- Pendapatan Investasi Lainnya	-	1.333.137.275	143.835	-	926.751,79
- Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.475.700.000.000	815.578.302.133	247.609.879.250	55,27	229,38
<b>Sub Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>12.670.715.460.862</b>	<b>6.767.348.478.226</b>	<b>6.030.630.254.179</b>	<b>53,41</b>	<b>12,22</b>
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi					
- Obligasi	200.808.780.896	535.901.550.543	(2.685.639.878.249)	266,87	119,95
- Sukuk	14.632.991.000	543.868.304.405	(521.924.489.163)	3.716,73	204,20
- Medium Term Notes	643.053.739	(171.714.600)	(80.261.400)	(26,70)	(113,94)
- Reksadana	66.810.585.850	171.545.898.579	(151.873.394.225)	(256,76)	212,95
- Saham	544.470.000.222	809.550.012.107	(1.130.235.752.035)	(148,69)	171,63
- Properti Investasi	-	314.000.000	-	-	-
- Penempatan Langsung	-	204.243.994.865	-	-	-
<b>Sub Jumlah Peningkatan (Penurunan)</b>	<b>827.365.411.706</b>	<b>2.265.252.045.899</b>	<b>(4.489.753.775.072)</b>	<b>(273,79)</b>	<b>150,45</b>
Peningkatan/Penurunan Aset Tetap	-	693.396.775.700	888.347.643	-	77.954,66
Iuran Peserta	8.812.478.909.986	4.352.360.257.503	4.417.326.372.455	49,39	(1,47)
Pendapatan Diluar Investasi	1.429.302.796.789	128.587.225	3.078.141.289	0,01	(95,82)
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>23.739.862.579.342</b>	<b>14.078.486.144.553</b>	<b>5.962.169.340.494</b>	<b>59,30</b>	<b>136,13</b>
<b>2. PENGURANGAN</b>					
- Beban Investasi	8.239.562.219	5.365.681.139	3.548.150.721	65,12	51,22
- Beban Operasional					
- Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	711.519.600.000	352.701.841.025	329.655.236.255	49,57	6,99
- Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS	848.385.885.209	453.052.847.405	403.814.500.932	53,40	12,19
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.506.017.657	1.381.162.345	959.150.992	91,71	44,00
- Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	154.214.852.326	54.229.053.825	51.438.114.943	35,16	5,43
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>1.723.865.917.411</b>	<b>866.730.585.739</b>	<b>789.415.153.843</b>	<b>50,28</b>	<b>9,79</b>
<b>3. PENINGKATAN/PENURUNAN DANA BERSIH</b>					
Dana Bersih Awal Periode	22.015.996.661.931	13.211.755.558.814	5.172.754.186.651	60,01	155,41
Koreksi Dana Bersih	162.620.393.903.496	176.618.497.222.178	171.445.743.035.527	108,61	3,02
	-	6.672.540.000	-	-	-
<b>Dana Bersih Akhir Periode</b>	<b>184.636.390.565.427</b>	<b>189.836.925.320.992</b>	<b>176.618.497.222.178</b>	<b>102,82</b>	<b>7,48</b>

Sumber: Accounting Division

Penyajian Laporan Perubahan Dana Bersih Pensiun Berdasarkan PMK 169/PMK.02/2019



Lampiran 3

**PT TASPEN (PERSERO)**  
**AKUMULASI IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2021

Rupiah

URAIAN	Semester II Tahun 2021	Semester I Tahun 2021
(1)	(2)	(3)
<b>I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Penerimaan Bunga Deposito	962.583.146.425	967.372.761.176
- Penerimaan Bunga Obligasi	3.924.981.279.954	3.629.824.122.047
- Penerimaan Hasil Sukuk	946.431.875.057	843.196.741.751
- Penerimaan Bunga MTN	1.507.500.000	1.507.500.000
- Penerimaan Imbal Hasil Reksadana	68.360.247.887	67.679.771.365
- Penerimaan Dividen Saham	108.972.452.159	40.837.775.852
- Penerimaan Dividen Reksadana	33.145.748.980	22.678.622.390
- Penerimaan Dividen Penyertaan	2.205.450.000	
- Penerimaan Sewa Properti	-	
- Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	815.578.302.133	247.609.879.250
- Penanaman Investasi	(43.399.564.390.306)	(43.342.229.531.388)
- Pencairan Investasi	39.422.796.231.695	26.590.389.960.805
- Pembayaran Beban Investasi	(5.365.681.139)	(3.548.150.721)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>2.881.632.162.845</b>	<b>(10.934.680.547.473)</b>
<b>II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
- Perolehan Aset Bukan Investasi	(7.679.578.974.902)	7.359.086.394.314
- Penambahan (Pengurangan) Liabilitas	(50.473.441.703)	(21.376.425.343)
- Penambahan Pendapatan diluar Investasi	1.277.645.577.289	3.078.141.289
- Pembayaran Beban Operasional	(762.348.005.078)	(733.469.737.143)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>(7.214.754.844.394)</b>	<b>6.607.318.373.117</b>
<b>III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
- Penerimaan Iuran Peserta	4.387.957.452.647	4.377.890.834.192
- Pembayaran Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	(54.229.053.825)	(51.438.114.943)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>4.333.728.398.822</b>	<b>4.326.452.719.249</b>
<b>IV KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BERSIH</b>	<b>605.717.273</b>	<b>(909.455.107)</b>
<b>V KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>	<b>1.809.458.610</b>	<b>2.718.913.717</b>
<b>VI KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.415.175.883</b>	<b>1.809.458.610</b>

Sumber: Accounting Division

Penyajian Laporan Dana Bersih Pensiun berdasarkan PMK 169/PMK.02/2019